

**KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU RA (Studi Kasus pada RA. Aisyiyah Nurhaq Baruga
Kendari)**



TESIS
**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
Pendidikan Islam pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam**

Oleh:

Wehadi
NIM. 18040201022

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI

1442 H/2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
PASCASARJANA**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp/Fax (0401-3193710).
E-Mail. pascasarjana.iainkendari@gmail.com. Website. iain-kendari.ac.id

PENGESAHAN MUNAQASYAH TESIS

Tesis dengan judul: “*Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu RA (Studi Kasus Pada RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari)*”, yang disusun oleh Saudari **Wehadi** dengan NIM. 18040201022, Program Studi: Manajemen Pendidikan Islam telah diujikan dalam Sidang *Ujian Munaqasyah Tesis* pada Pascasarjana IAIN Kendari, hari/tanggal : Minggu, 12 Juli 2020 M/ 21 Zulkaidah 1441, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran serta permintaan Tim Penguji sebagai Salah Satu Syarat memperoleh Gelar Magister Pendidikan.

TIM PENGUJI :

Dr. Laode Abdul Wahab, M.Pd

(Ketua Tim Penguji)

Dr. Asliah Zainal, MA

(Sekretaris)

Dr. Hj. Nurseha Gazali, M.SI

(Penguji I)

Dr. Akib, M.Pd

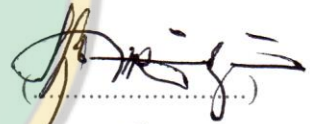
(Penguji II)

Dr. H. Herman, M.Pd.I

(Penguji Utama)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)



Kendari, 05 Agustus 2020
Direktur,



Dr. Laode Abdul Wahab, M.Pd

NIP. 197608202003121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam tesis berjudul “Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu RA (Studi Kasus pada RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari)” dibawah bimbingan Dr. Hj. Nurseha Gazali, M.Si dan Dr. Asliah Zainal, MA. telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam tesis ini telah disebutkan dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 02 Juli 2020 M
11 Zulkaidah 1441 H



wehadi
wehadi

NIM 18040201022

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wehadi
NIM : 18040201022
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Program Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu RA (Studi Kasus pada RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Eksekutif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari

Pada Tanggal : 02 Juli 2020

Yang Menyatakan



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
اله واصحبه اجمعين

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Shalawat serta salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, sebagai tokoh revolusioner yang telah merubah tatanan kehidupan kejahiliah menjadi hikmah dan tentram.

Rasa syukur tiada terkira bagi penulis yang telah menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan khususnya kepada suami saya Baharuddin yang sangat mendukung saya, motivasi dan do'a paling tulus sehingga bisa menyelesaikan penyusunan tesis ini dan memberikan dukungan baik moril, materil yang telah banyak dikorbankan untuk saya.


Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd, selaku Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis.
2. Dr. Laode Abdul Wahab, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Kendari

3. Dr. Hj. Nurseha Gazali, M.Si dan Dr. Asliah Zainal, MA, selaku pembimbing yang banyak membantu dan mengarahkan penulisan tesis ini. Semoga beliau semua diberikan balasan pahala dari Allah SWT.
4. Dr. Akib, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana yang telah mengarahkan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi.
5. Dr. H. Herman, M.Pd, selaku penguji utama yang telah memberikan masukan, koreksian, juga pandangan dalam penulisan tesis ini.
6. Kepada Kasubbag TU Pascasarjana bapak Mukadar, S.Pd.I, M.Pd.I dan seluruh staf pengelola Pascasarjana IAIN kendari yang sudah memfasilitasi penulis dari awal hingga penyelesaian studi kami.
7. Tilman, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Perpustakaan IAIN, yang telah banyak menyediakan dan memberikan kemudahan dalam hal peminjaman buku-buku referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini dengan baik.
8. Kepada Kepala RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari beserta guru-guru yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
9. Kepada seluruh dosen dan staf Pascasarjana IAIN Kendari yang telah banyak memberikan ilmu, ramah dan cekatan dalam melayani setiap keluhan penulis dalam menyelesaikan tesis
10. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2018 yang telah memberikan dorongan motivasinya. Semoga kebersamaan kita membawa kenangan indah.

11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan segala kritikan yang sifatnya membangun dari semua pembaca demi kesempurnaan penelitian ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.



Kendari, 02 Juli 2021

Penulis



Wehadi

NIM.18040201022

ABSTRAK

Wehadi NIM 18040201022, “Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu RA (Studi Kasus pada RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari)”. Dibimbing oleh Dr. Hj. Nurseha Gazali, M.Si, sebagai Pembimbing I dan Dr. Asliah Zainal, MA, sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) proses kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari, (2) mutu pendidikan RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari, (3) faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan kebijakan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari, (4) implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari. Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kebijakan kepala sekolah di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses kebijakan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga adalah dengan melakukan perencanaan atau perumusan kebijakan yang dibuat kemudian melakukan pengorganisasian agar kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan dan mengimplementasikan kebijakan yang dibuat serta melakukan evaluasi program sekolah, (2) Mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga telah menerapkan delapan Standar Nasional Pendidikan (8 SNP) sehingga status RA Aisyiyah Nurhaq terakreditasi B, (3) Faktor pendukung kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga ini, di antaranya; guru yang berpendidikan S-1, sarana dan prasana yang cukup mendukung, adanya kekompakan antara guru dalam mendukung segala kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah. Adapun faktor penghambat, yaitu minimnya pendanaan yang tersedia dan masih ada guru yang melaksanakan tugasnya tidak sesuai tugas fungsionalnya, (4) Implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu di RA Aisyiyah Nurhaq adalah menerapkan program *full day school*, bimbingan ibadah dan kegiatan ekstrakurikuler berupa bimbingan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.

Kata Kunci: Kebijakan Kepala Sekolah, Mutu RA

ABSTRACT

Wehadi (18040201022), Principal's Policy in Improving RA Quality (Case Study on RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari)". Supervised by Dr. Hj. Nurseha Gazali, M.Si, as Supervisor I and Dr. Asliah Zainal, MA, as supervisor II.

This research aims to describe and analyze: (1) the principal's policy process in improving quality in RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari, (2) the quality of RA education in Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari, (3) supporting and inhibiting factors in implementing the principal's policy to improve the quality of RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari. This type of research uses a qualitative approach. Data was collected through observation, interviews, and school principal policy documentation at RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari, (4) the implementation of the principal's policy in improving the quality of education in RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari. The results of the study show that: (1) The principal's policy process in order to improve the quality of RA Aisyiyah Nurhaq Baruga is by planning or formulating policies that are made then organizing so that the policies that have been made can run and implementing policies made and evaluating school programs, (2) RA Aisyiyah Nurhaq Baruga's Quality has implemented eight National Education Standards (8 SNP) so that of status RA Aisyiyah Nurhaq is accredited B, (3) Factors supporting the principal's policy in improving the quality of RA Aisyiyah Nurhaq Baruga, including; S-1 educated teachers, facilities and infrastructures that are sufficiently supportive, there is cohesiveness between teachers in supporting all policies made by the school principal. As for the inhibiting factors, namely the lack of available funding and there are still teachers who carry out their tasks not in accordance with their functional tasks, (4) Implementation of the principal's policy in improving quality at RA Aisyiyah Nurhaq is implementing a full day school program, religious guidance and extracurricular activities in the form of English and Arabic guidance.

Keywords: Principal Policy, RA Quality

الملخص

وحدي (٢٠٢٢، ٢٠١٠، ٢٠٢٠، ١٨٠٤)، "سياسة المدير في تحسين الجودة روضة الأطفال (دراسة حالة في روضة الأطفال عيشية نرهق بروغ كنداري)". تسترشد الدكتورة الحاجة نورسيها غزالي، ماجستير في العلوم، كمستشار الأول والدكتورة أصلية زينل، ماجستير في الدين، والمشرف الثاني.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل: (١) عملية سياسة المدير في تحسين الجودة في روضة الأطفال عيشية نرهق بروغ كنداري، (٢) جودة تعليم روضة الأطفال في روضة الأطفال عيشية نرهق بروغ كنداري، (٣) العوامل المساعدة والمثبطة في تنفيذ سياسة المدير لتحسين نوعية روضة الأطفال عيشية نرهق بروغ كنداري، (٤) تنفيذ سياسة المدير في تحسين جودة التعليم في روضة الأطفال عيشية نرهق بروغ كنداري. يستخدم هذا النوع من البحث نهجاً نوعياً. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات ووثائق سياسة المدرسة الرئيسية في روضة الأطفال عيشية نرهق بروغ كنداري. أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: (١) عملية سياسة المدير من أجل تحسين جودة روضة الأطفال عيشية نرهق بروغ هي من خلال تخطيط أو صياغة السياسات التي يتم وضعها ثم تنظيمها بحيث يمكن للسياسات التي تم وضعها تنفيذ السياسات التي يتم تنفيذها وتقييم البرامج المدرسية، قامت روضة الأطفال عيشية نرهق بروغ بتنفيذ ثمانية معايير تعليمية وطنية بحيث يتم اعتماد وضع روضة الأطفال عيشية نرهق بروغ معتمد ب، (٣) عوامل تدعم سياسة المدير في تحسين جودة روضة الأطفال عيشية نرهق بروغ، بما في ذلك؛ المعلمون المتعلمون والمنشآت والبنى التحتية التي تدعم بكالوريوس تدعم بشكل كافٍ، هناك ترابط بين المعلمين في دعم جميع السياسات التي يضعها مدير المدرسة. أما العوامل المثبطة، وهي نقص التمويل المتاح وما زال هناك مدرسون يقومون بمهامهم بما لا يتوافق مع مهامهم الوظيفية، (٤) تنفيذ سياسة المدير في تحسين الجودة في روضة الأطفال عيشية نرهق بروغ تطبيق برنامج مدرسي ليوم كامل، وإرشاد ديني وأنشطة لا منهجية في شكل توجيه باللغتين الإنجليزية والعربية.

الكلمات الرئيسية: السياسة الرئيسية، جودة روضة الأطفال

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN HASIL TESIS	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	13
1.3 Rumusan Masalah.....	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Manfaat Hasil Penelitian.....	14
1.6 Definisi Operasional.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kebijakan Pendidikan.....	17
2.2 Konsep Peningkatan Mutu.....	42
2.3 Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu RA..	50
2.4 Penelitian Relevan.....	68
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	72
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	73
3.3 Partisipan Peneliti.....	73
3.4 Teknik Pengumpulan data.....	74
3.5 Teknik Analisis Data.....	76
3.6 Pengecekan Keabsahan Data.....	79
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	83
4.1.1 Proses Kebijakan Kepala Sekolah di RA Aisyiyah Nurhaq.....	83

4.1.2 Mutu Pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq.....	85
4.1.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq.....	89
4.1.4 Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan RA Aisyiyah Nurhaq.....	93
4.2 Pembahasan.....	108
4.2.1 Proses Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Meningkatkan Mutu di RA Aisyiyah Nurhaq.....	108
4.2.2 Mutu Pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq.....	111
4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq.....	115
4.2.4 Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq.....	118
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	122
5.2 Limitasi Penelitian.....	123
5.2 Rekomendasi.....	124
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	130

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	<i>B</i>	-
ت	<i>ta'</i>	<i>T</i>	-
ث	<i>sa</i>	<i>S</i>	<i>s</i> (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	<i>J</i>	-
ح	<i>ha'</i>	<i>H</i>	<i>h</i> (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	<i>Kh</i>	-
د	<i>dal</i>	<i>D</i>	-
ذ	<i>zal</i>	<i>Z</i>	<i>z</i> (dengan titik di atas)
ر	<i>ra'</i>	<i>R</i>	-
ز	<i>zai</i>	<i>Z</i>	-
س	<i>sin</i>	<i>S</i>	-
ش	<i>syin</i>	<i>Sy</i>	-
ص	<i>sad</i>	<i>S</i>	<i>s</i> (dengan titik di bawah)
ض	<i>dad</i>	<i>D</i>	<i>d</i> (dengan titik di atas)
ط	<i>ta'</i>	<i>T</i>	<i>t</i> (dengan titik di atas)
ظ	<i>za'</i>	<i>Z</i>	<i>z</i> (dengan titik di atas)
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik
غ	<i>gain</i>	<i>G</i>	-
ف	<i>fa'</i>	<i>F</i>	-
ق	<i>qaf</i>	<i>Q</i>	-
ل	<i>lam</i>	<i>L</i>	-
م	<i>mim</i>	<i>M</i>	-
ن	<i>nun</i>	<i>N</i>	-
و	<i>wawu</i>	<i>W</i>	-
ه	<i>ha'</i>	<i>H</i>	-
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	<i>ya'</i>	<i>Y</i>	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah	<i>A</i>	<i>a</i>
Kasrah	<i>I</i>	<i>i</i>
Dammah	<i>U</i>	<i>u</i>

2. Vokal rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan ya	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
Fathah dan wawu	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>A</i>	<i>a</i> dengan garis di atas
Kasrah dan <i>ya</i>	<i>I</i>	<i>i</i> dengan garis di atas
Dammah dan <i>wawu</i>	<i>U</i>	<i>u</i> dengan garis di atas

4. *Ta' Marbutah* hidup

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua:

a. *Ta' Marbutah* hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (*t*)

b. *Ta' Marbutah mati*

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah (*h*).

- c. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta'* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang "*al*" serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (*ha*).

5. *Syaddah* (tasydid) ialah yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah*, dalam transliterasinya ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ﻝ**. Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariah*.

a. Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu "*al*" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

b. Kata sedang yang diikuti huruf *qomariah*

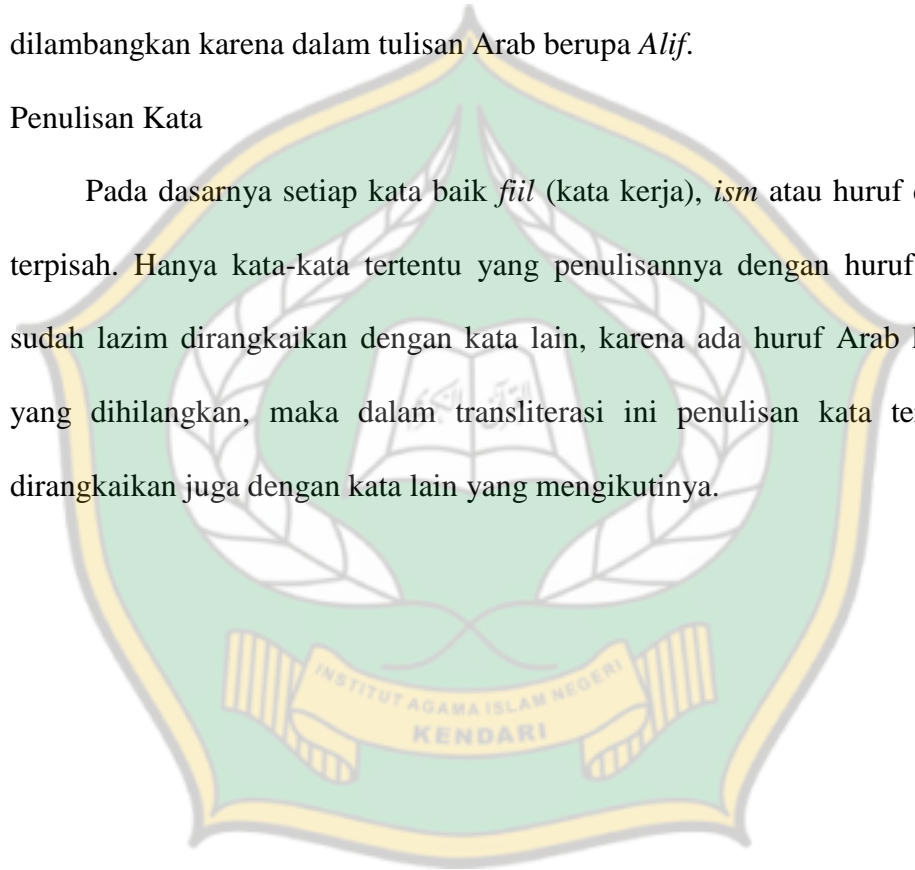
Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bisa diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qomariah* kata sandang.

7. *Hamzah*

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *Alif*.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fil* (kata kerja), *ism* atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pemerintah menyelenggarakan pembaruan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik merupakan dampak dari tuntutan reformasi total. Dampak reformasi pendidikan adalah melahirkan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang meliputi demokratisasi pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, penghapusan diskriminasi, serta perbaikan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat juga menuntut adanya pembaruan sistem pendidikan, agar sesuai dengan tuntutan global. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan strategi dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (Tabrani dkk, 2013, h. 246).

Mengingat semua penyelenggaraan pendidikan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka dalam menyelenggarakan pendidikan, dituntut memenuhi mutu minimal yang ada dalam Standar Nasional Pendidikan tersebut. Selain itu, diperlukan pula strategi-strategi dalam pelaksanaannya, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif (Tabrani dkk, 2013, h. 249).

Perubahan paradigma pendidikan di era globalisasi ini mengharuskan adanya perubahan pola pikir (*mindset*) dan pola tindak (*actionset*) bagi guru terutama dalam mengimplementasikan dan mengembangkan kurikulum (KTSP) yang berlaku sekarang. Perubahan pola pikir dan pola tindak bagi guru dalam mengelola kelas dan melaksanakan proses pembelajaran, menuntut kreatifitas dan kemampuan megembangkan inovasi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan khususnya layanan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses. Dalam Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 menjelaskan,

“Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien”.

Pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Sesuai kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan perlu diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Hal ini diharapkan dapat memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat 1, h. 2).

Pendidikan dapat diperoleh dari usia dini atau kanak-kanak. Di usia ini, karakter manusia dapat dibentuk dan diciptakan sesuai dengan pendidikan yang didapat. Salah satu tujuan adanya pendidikan, yaitu dapat menciptakan keselamatan serta kebahagiaan bagi umat manusia, sesuai dengan pernyataan Ki Hadjar Dewantara yang dikutip oleh Burhanuddin (2013, h. 3) bahwa,

“Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya”.

Lebih lanjut Ki Hadjar Dewantara dalam Haryanto (2010, h. 15) juga menyatakan bahwa beliau juga ingin,

“1) menempatkan anak didik sebagai pusat pendidikan, 2) memandang pendidikan sebagai suatu proses yang dengan demikian bersifat dinamis, dan 3) mengutamakan keseimbangan antar cipta, rasa, dan karsa dalam diri anak”.

Mutu pendidikan merupakan suatu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pihak sekolah dalam menciptakan anak didik yang berkualitas. Sekolah dapat dikatakan bermutu apabila di dalam sekolah tersebut terdapat proses pembelajaran yang baik, serta mempunyai lembaga atau badan-badan sekolah yang mampu menangani dan bertanggung jawab atas hasil belajar anak didiknya. Menurut Zahid (2014, h. 669), mutu pendidikan merupakan konsep multidimensi meliputi kelembagaan, pengajaran dan hasil belajar siswa.

Berbagai permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia adalah tentang kesempatan pemerolehan pendidikan anak usia dini masih belum merata dan masih terkonsentrasi di daerah perkotaan, kurangnya

tenaga pendidik dan kependidikan dari segi jumlah dan mutu, serta masih banyaknya pembelajaran yang berorientasi pada keinginan orang tua bukan pada kebutuhan anak. Berangkat dari kondisi nyata pendidikan anak usia dini tersebut, untuk mengarah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, pemerintah telah mengeluarkan tiga pilar kebijakan pemerintah dalam pendidikan anak usia dini dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2009-2014, dan sekarang pemerintah telah menyempurnakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam Kerangka Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019 (Renstra terbaru) (Istiqomah, 2016, h. 57).

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan sejak dini, yang paling utama dari lingkup keluarga dan sekolah sebagai kelanjutannya. Potensi anak akan berkembang sangat pesat yakni antara umur 0 sampai dengan 6 tahun, disitulah pentingnya pendidikan usia dini karena umur tersebut adalah periode usia emas (*golden age*). Pendidikan di sekolah bagi anak usia dini memberikan banyak kesempatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan yang menyangkut fisik motorik halus dan kasar, kecerdasan, sosio emosional bahasa dan komunikasi, sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Menurut Apriana, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Apriana, 2009, h. 3).

PAUD merupakan suatu tahap pendidikan yang tidak dapat diabaikan, karena ikut menentukan perkembangan dan keberhasilan anak. Dengan adanya PAUD diharapkan anak akan tumbuh dan berkembang dengan identitas diri yang kuat (Noorlaila, 2010, h. 8). Pada saat ini di era pembangunan dalam rangka menghasilkan manusia yang memiliki sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas memberikan perhatian yang begitu besar pada PAUD. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hal ini dikarenakan PAUD memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan dan menyiapkan pribadi peserta didik secara utuh dan menyeluruh. PAUD merupakan salah satu jenjang yang paling strategis serta menentukan perjalanan dan masa depan anak secara keseluruhan, serta akan menjadi fondasi bagi penyiapan anak memasuki pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, bahkan akan mewarnai seluruh kehidupannya kelak di masyarakat. Oleh karena itu, PAUD harus memperoleh perhatian yang layak dari berbagai pihak, baik keluarga, pemerintah dan masyarakat (Istiqomah, 2016, h. 58).

Tingginya harapan masyarakat dengan adanya pendidikan usia dini terlihat dari keantusiasan orang tua dalam menyekolahkan putra-putrinya. Hal ini tidak lepas dari guru yang telah melahirkan penerus yang berkualitas. Guru dinilai baik dalam mengajar yaitu ketika guru mampu menguasai kelas dan

terampil dalam menarik minat siswa untuk belajar dengan baik. Menurut Max, mengajar membutuhkan keterampilan improvisasi langsung yaitu dengan mengetahui bagaimana menginterpretasikan situasi yang selalu berubah, perubahan waktu, tanggap dengan apa yang terjadi pada anak, apa yang harus dilakukan, bagaimana menyajikan sesuatu, bagaimana menahan, dan cara membuat nada yang tepat dalam kelas (Manen, 1991, h. 187).

Peningkatan kualitas atau mutu pendidikan PAUD tidaklah mudah. Beberapa PAUD tidak mengalami peningkatan mutu dikarenakan beberapa hal yaitu: 1) Masalah pendidiknya, tidak sedikit lembaga PAUD yang masih asal-asalan berjalan disebabkan karena usia yang relatif baru sehingga pendidiknya kurang berkualitas, belum kreatif dan inovatif; 2) Lembaga PAUD yang masih baru pelaksanaan program masih bersifat asal jalan, asal dapat peserta didik tanpa memperhatikan kualitas pelayanan pendidikan, baik dari segi sarana prasarana, tenaga pendidik/pengasuh, maupun metode pembelajarannya dan 3) Tenaga pendidik yang berkualifikasi dan berkompentensi yang ada sangat terbatas, serta yang berlatar belakang pendidik PAUD, masih heterogen bahkan tak sedikit yang berdasar pengalaman semata (Freyani, 2013).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pendidik yang belum memiliki kualifikasi dan kemampuan sebagai pendidik. Ada beberapa hal yang menjadi acuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas PAUD. Di antaranya acuan itu adalah sebagai berikut: 1) ada standar minimal sebelum masyarakat atau yayasan mendirikan lembaga PAUD, 2) pendidik yang akan terjun langsung di PAUD seharusnya dilatih terlebih dahulu

minimal 2 bulan, sehingga ketika terjun bisa menguasai kelas dengan baik; 3) pendidik PAUD harus tidak berhenti belajar, hendaknya mengikuti pelatihan rutin baik itu sebulan sekali atau dua minggu sekali, 4) pengoptimalan Himpaudi & Forum PAUD, karena anggotanya juga terdiri dari pendidik yang tentunya lebih mengerti pelatihan yang mendesak harus diadakan itu apa; 5) mengadakan studi banding, 6) guru lebih meningkatkan gemar membaca karena ilmu tentang PAUD sangat luas, apalagi mempelajari anak yang unik di butuhkan ilmu yang banyak; 7) guru atau pendidik harus sekolah lagi; 8) pengalokasian dana dari Pemerintah Daerah untuk peningkatan mutu pendidik PAUD di daerah masing-masing; dan 9) ditumbuhkan jiwa meneliti bagi para guru karena begitu kompleknya permasalahan anak, maka setidaknya pendidik harus gemar meneliti jika ada permasalahan yang dirasa mengganjal (Freyani, 2013).

Mulyasa (2011, h. 19) mengatakan bahwa,

“Pemerintah sering melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas guru, antara lain melalui pelatihan, seminar dan loka karya. Bahkan melalui pendidikan formal, dengan menyekolahkan guru pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam praktek pendidikan sehari-hari masih banyak guru yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam menunaikan tugas dan fungsinya. Hal ini merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri, meskipun sebagian besar tidak menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Oleh karena itu dibutuhkan media yang dapat membantu para guru untuk mengidentifikasi permasalahan dan berupaya menemukan pemecahan sendiri melalui kegiatan diskusi dalam kelompok kerja, sekaligus merupakan media pembinaan oleh pemerintah.

Dalam konteks dunia pendidikan, bagaimana cara mewujudkan pendidikan yang bermutu, manusia (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, karyawan, peserta didik, orang tua atau wali siswa, dan

stakeholder adalah pelanggan yang harus menjadi pusat perhatian dalam memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya. Kepuasan peserta didik terletak pada proses yang sedang berlangsung dan hasil pendidikan yang memuaskan dalam proses pendidikan. Dengan demikian, kualitas pendidikan bukanlah suatu yang berdiri sendiri tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan terkait sebagai suatu proses dalam sebuah sistem, bila membicarakan masalah kualitas pendidikan maka tidak akan terlepas dari tiga unsur pendidikan yaitu, masukan, proses dan lulusan. Keberadaan lulusan lembaga pendidikan merupakan SDM yang menjadi subjek dan objek pembangunan yang perlu ditingkatkan kualitasnya melalui jalur pendidikan dalam fungsi, proses, dan aktifitasnya yang bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan nasional (Syafaruddin, 2002, h. 2).

Keberadaan sekolah sebagai lembaga formal penyelenggaraan pendidikan memainkan peran strategis dalam keberhasilan sistem pendidikan nasional. Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin adalah bertanggung jawab dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. Perlu dicermati oleh kepala sekolah dalam membuat kebijakan baru adalah menciptakan keadaan baru dari rutinitas yang memungkinkan mendapat penolakan dari personel sekolah. Karena itu, perlu melibatkan personel sekolah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan baru sekolah supaya ada proses pembelajaran dan komitmen dalam keberhasilan kebijakan meningkatkan mutu sekolah (Taufan & Mazhud, 2014, h. 63).

Oleh karena itu, sekolah dituntut dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan terwujud kebijakan kepala sekolah dalam memimpin dan mengatur kegiatan di sekolah sehingga dapat meningkatkan kinerja guru. Pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan penyediaan sumber daya manusia dan meningkatkan kinerja guru dengan mengatur kegiatan kegiatan di sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melihat berbagai faktor faktor yaitu. Menurut Fattah dalam buku Engkoswara dan Aan Komariah (2015, h. 313), ada tiga faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu: (1) kecukupan sumber sumber pendidikan dalam arti mutu tenaga kependidikan, biaya, sarana belajar, (2) mutu proses belajar yang mendorong siswa belajar efektif, dan (3) mutu pengeluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai-nilai.

Di samping itu juga, ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia tidak mengalami peningkatan secara merata yaitu:

1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production foundation* atau input input analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen, yaitu terlalu memusatkan pada input proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan *output* pendidikan.
2. Penyelenggaraan pendidikan nasional yang sentralistik, telah mengakibatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang mempunyai jalur yang panjang

dan kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

3. Peran serta masyarakat, khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan yang minimnya partisipasi mereka terhadap pendidikan (Mulyasa, 2013, h. 24).

Dalam kata lain masalah yang mendasar terkait dengan masalah mutu pendidikan di Indonesia yaitu:

1. Proses pembelajaran di lembaga pendidikan yang selalu berorientasi pada penguasaan teori dan hapalan pada mata pelajaran sehingga menyebabkan kemampuan belajar dan penalaran anak didik kurang berkembang.
2. Kurikulum di sekolah yang selalu berubah ubah yaitu kurikulum 1994 berupa CBSA, menjadi KBK, lalu ditahun 2006 menjadi KTSP dan K13 (Berbasis karakter).
3. Pelaksanaan pembinaan profesi jabatan guru belum tersistem.
4. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu terpenting dalam pembangunan pendidikan UU No 20 tahun 2003 telah mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD kedinasan, namun kenyataanya hanya beberapa dari yang menggratiskan pendidikan yang hanya untuk sekolah negeri, dan tidak sepenuhnya gratis yang masih ada beberapa pungutan beberapa biaya dari sekolah yang penagaturannya biasanya di lakukan oleh sekolah dan komite sekolah.

5. Otonomi daerah yang menuntut penyelenggaraan pendidikan nasional yang memenuhi kebutuhan pembangunan daerah sebagai dasar pembangunan nasional dan kerjasama regional (Hasbullah, 2016, h. 49).

Dengan masalah yang mendasar terkait dengan masalah mutu pendidikan di Indonesia, maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan profesional karena kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kunci keberhasilan suatu sekolah pada hakekatnya terletak pada efisiensi dan efektivitas seorang kepala sekolah. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah dan keberhasilan kepala sekolah adalah keberhasilan sekolah.

Indikator mutu pendidikan menunjukkan peningkatan yang berarti bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor *input* agar menghasilkan *out put* yang setinggi-tingginya. pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan) (Mulyasa, 2004, h. 226).

Dengan demikian bahwa mutu pendidikan terkait dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat. Di mana kebutuhan masyarakat dan perubahan yang

terjadi bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pendidikan juga harus bisa menyeimbangi perubahan yang terjadi secara cepat, dan bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan memerlukan pemetaan dan kebijakan yang profesional yaitu oleh kepala sekolah. Hal itu diperlukan personal yang mampu dan tangguh. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian penyerasian serta pemanduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum sarana dan prasarana) sehingga pembelajaran yang menyenangkan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

Berdasarkan data studi pendahuluan, peneliti menemukan fakta bahwa mutu di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari berupa: 1) tenaga pendidik yang berpendidikan S-1, 2) memiliki sarana dan prasarana yang cukup mendukung. Sebagai pendidikan formal, RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari mempunyai potensi untuk berkembang sebagai lembaga pendidikan yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Dalam perkembangann mutu pendidikan, RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari patut dibanggakan, karena merupakan salah satu sekolah yang sudah menjalankan sekolah diminati oleh masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.

Tercapainya mutu di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari tidak terlepas dari peranan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah tersebut. Penerapan kebijakan kepala sekolah berperan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agar bisa terlaksana secara optimal. Sehingga dengan terlaksananya kegiatan pendidikan yang bermutu diharapkan akan terbentuk citra yang positif dan partisipasi aktif masyarakat di dunia

pendidikan. Jadi berkualitas atau tidaknya suatu mutu di sekolah akan tampak pada peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu, pengawasan yang benar dan objektif menjadi kunci berkualitasnya program dan kegiatan sekolah. Berangkat dari fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah dengan mengambil judul: **“Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu RA (Studi Kasus pada RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kepala sekolah untuk meningkatkan mutu Raudhatul Athfal Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari. Secara khusus, kebijakan kepala sekolah yang diterapkan oleh kepala RA dalam meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari dalam hal proses kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan, mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq, implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari?
2. Bagaimana mutu pendidikan RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari?

3. Bagaimana implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mutu pendidikan RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan kebijakan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1.5.1 Manfaat Secara Teoretis

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah keilmuan dalam usaha pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

1.5.2 Manfaat Secara Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memperoleh pengalaman profesional yang sangat berharga dan sebagai bahan perbandingan antara teori yang pernah penulis dapatkan di bangku perkuliahan dengan realita yang ada di lapangan.
2. Bagi Kepala Sekolah, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi kepala sekolah untuk melaksanakan dalam rangka peningkatan mutu RA dengan cara yang lebih baik.
3. Bagi Guru, dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan motivasi bagi pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga kependidikan yang ada pada dirinya sebagai seorang pendidik yang profesional di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.
4. Bagi Pengurus Yayasan, hasil penelitian ini diharapkan sebagai wacana pengembangan dan peningkatan mutu pada setiap komponen pendidikan dalam satu naungan Yayasan Pendidikan Aisyiyah.
5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini sebagai acuan dan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya.
6. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan peningkatan mutu di RA. Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap beberapa istilah dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan beberapa definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan tercapainya tujuan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Kebijakan yang dalam hal ini adalah kebijakan kepala sekolah di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.
2. Peningkatan Mutu adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus meningkatkan kualitas dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Peningkatan mutu dalam penelitian ini adalah proses yang dilakukan terus menerus dalam meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pendidikan

2.1.1 Konsep Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani yaitu “*polis*” yang artinya kota. Analisis kebijakan pendidikan dapat dipahami baik melalui pendekatan metodologis maupun konseptual. Metodologi pada intinya merupakan keseluruhan proses yang secara sistematis dilakukan untuk melembagakan analisis kebijakan dalam suatu sistem dan mekanisme yang institusional. Secara konseptual analisis kebijakan merupakan suatu ilmu perkerjasama sosial (*social engineering*) yang artinya ialah ilmu yang ditujukan untuk melahirkan manfaat dari konsep dan teori dalam berbagai disiplin ilmu sosial untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu kebijakan publik (Suryadi dan Budimansyah, 2009, h. 49).

Good dalam Imron (2008, h. 18) menyatakan bahwa,

“Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situational factors, operating within institutionalized adecation as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives”.

Pengertian pernyataan di atas adalah, bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil

keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Tilaar dan Nugroho (2008, h. 140) menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan, di antaranya adalah:

- 1) Kebijakan pendidikan dilahirkan dari kesatuan teori dan praktik
- 2) Kebijakan pendidikan mempunyai validitas perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu
- 3) Kebijakan pendidikan ditujukan pada kebutuhan peserta didik
- 4) Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran visi, misi dan tujuan pendidikan
- 5) Kebijakan pendidikan memiliki kejelasan tujuan untuk melahirkan pendidikan yang tepat.

Selain itu, kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

- 1) Memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
- 2) Memenuhi aspek legal-formal; Kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi

yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut.

- 3) Memiliki konsep operasional agar dapat diimplementasikan dan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai.
- 4) Dibuat oleh yang berwenang; Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga dan sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan.
- 5) Dapat dievaluasi; Kebijakan pendidikan tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki.
- 6) Memiliki sistematika; Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya (Suparlan, h. 2).

Dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan relevan adalah bagaimana memahami berbagai isu kebijakan pendidikan agar mampu melahirkan berbagai gagasan yang berguna dalam upaya menghasilkan alternatif kebijakan dalam membangun sistem pendidikan yang efisien, bermutu, dan sesuai dengan tuntutan

masyarakat. Kebijakan pendidikan adalah suatu bentuk tindakan yang diambil atas beberapa pertimbangan, untuk mengarahkan manajer/kepala sekolah dalam menentukan masa depan sekolah sesuai dengan visi, misi pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

2.1.2 Konsep Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamatkan dengan tegas perlunya penanganan pendidikan anak usia dini, hal tersebut bisa dilihat pada pasal 1 butir 14 yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.

Kemudian dalam Pasal 28 ayat 1-3 menyatakan bahwa,

“Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat”.

Sehubungan dengan kenyataan yang telah disebutkan sebelumnya, maka anak-anak yang tersentuh pendidikan dini yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal sudah sangat banyak jumlahnya. berkenaan dengan hal tersebut, maka sewajarnya bila peran

pendidikan luar sekolah yang mencakup pendidikan formal memberikan pelayanan pendidikan dini pada anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan di jalur pendidikan formal sangatlah penting dan mendesak.

Untuk membangun dan mengembangkan PAUD, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari sistem perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang bersifat teknis operasional. Berbagai ketentuan tentang pendidikan anak usia dini termuat dalam UU RI No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. Pada pasal 28, ditetapkan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan informal (Musbikin, 2010, h. 48-49).

Pendidikan anak usia dini dalam pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA). Pendidikan anak usia dini dalam jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan, pendidikan anak usia dini dalam jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan (Musbikin, 2010, h. 49).

Selebihnya, ketiga jalur pendidikan itu dapat kita jelaskan sebagai berikut; *Pertama*, satuan pendidikan anak usia dini pada jalur

formal. Pada jalur ini, ada beberapa institusi pendidikan yang jamak dikenal. Berikut di antaranya:

- 1) Taman Kanak-Kanak, yakni salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun.
- 2) Raudhatul Athfal, yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi anak usia 4 sampai 6 tahun.
- 3) Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal yang sederajat. Salah satu bentuk pendidikan anak usai dini pada jalur pendidikan formal selain taman kanak-kanak dan raudhatul athfal yaitu tarbiyatul athfal (TA), taman kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Adi Sekha, TK-SD Satu Atap, TK Asuh, TK Anak Pantai, TK Bina Anaprasa, TK di lingkungan tempat kerja, TK keliling, TK mahasiswa KKN, atau TK di lingkungan tempat ibadah (Musbikin, 2010, h. 49).

Kedua, satuan pendidikan anak usia dini pada jalur non formal.

Hal ini meliputi beberapa hal seperti berikut:

- 1) Kelompok bermain, yaitu salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 sampai 4 tahun.
- 2) Taman penitipan anak. Salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program

kesejahteraan sosial, perawatan, pengasuhan, dan pendidikan sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun.

3) Satuan pendidikan anak usia dini sederajat. Salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal selain taman penitipan anak dan kelompok bermain di antaranya, yaitu:

1) Pos pendidikan anak usia dini (Pos PAUD), yakni salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan program bina keluarga balita (BKB) dan/atau pos pelayanan terpadu (Posyandu).

2) Taman asuh anak muslim (TAAM), yakni salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak berusia 2 tahun sampai dengan 6 tahun yang berbasis Taman Pendidikan Al-Qur'an.

3) Pendidikan anak usia dini sekolah minggu (PAUD-SM), yakni salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Kristen bagi anak berusia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun yang berbasis sekolah minggu (Musbikin, 2010, h. 50).

4) Pendidikan anak usia dini bina iman anak (PAUD-BIA), adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Katolik bagi anak berusia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun yang berbasis bina iman anak Katolik.

Program pembelajaran pada anak usia dini di TK/RA dan bentuk lain yang sederajat menggunakan beban belajar satu tahun dalam bentuk perencanaan semester, perencanaan mingguan, dan perencanaan harian. Perencanaan program pembelajaran di TK/RA dan bentuk lain yang sederajat adalah perencanaan mingguan efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) ada 34 minggu, dengan jam belajar efektif 2,5 jam (150 menit); per minggu adalah 15 jam (900 menit); dan pertahun adalah 510 jam (30.600 menit) (Musbikin, 2010, h. 51).

Sementara itu, perencanaan pembelajaran pada kelompok bermain adalah untuk usia 2-4 tahun, kegiatan bermain per minggu minimal tiga kali pertemuan ideal selama 4 jam. Sedangkan, untuk perencanaan program pembelajaran pada taman penitipan anak adalah sebagai berikut:

- 1) *Full day care*; Anak dititipkan sehari penuh, dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00.
- 2) *Semi day care*; Anak dititipkan hanya setengah hari, dari jam 08.00 sampai dengan jam 12.00. atau jam 12.00 sampai jam 17.00.
- 3) *Incidental day care*; Anak hanya dititipkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan orang tua (Musbikin, 2010, h. 52).

Adapun untuk perencanaan program pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini sejenis adalah layanan minimal yang hanya dilakukan 1-2 kali/minggu. Tiap pertemuan minimal selama 2 jam dengan pertemuan ideal selama 6 jam. Sementara itu, berkaitan tentang kalender pendidikan, maka kalender pendidikan anak usia dini mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah setempat

Selanjutnya, sebagai implementasi dari undang-undang di atas (UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional), pemerintah juga telah mengeluarkan PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU No.14/2006 tentang Guru dan Dosen, di mana salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini wajib memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S-1 serta kompetensi sebagai pendidik. Para calon guru yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 dan kompetensi sebagai pendidik selanjutnya harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Selain perundang-undangan, telah ditetapkan pula kebijakan pemerintah berkenaan dengan tugas dan ekspektasi kinerja guru PAUD (Musbikin, 2010, h. 53).

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini terbagi dari pendidikan formal, non formal,

dan informal. Dan guru pendidikan anak usia dini hendaknya memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S-1.

PAUD memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya karena merupakan pondasi bagi dasar kepribadian anak. Anak yang mendapatkan pembinaan yang tepat dan efektif sejak usia dini akan dapat meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan fisik dan mental, yang berdampak pada peningkatan prestasi belajar anak, etos kerja anak, produktivitas sehingga mampu mandiri dan mengoptimalkan potensi dirinya. PAUD sangat menentukan kesuksesan seseorang di masa depan; bagaimana seseorang merespons berbagai permasalahan yang dihadapi dalam setiap langkah kehidupan sangat ditentukan oleh pengalaman dan pendidikan yang diperoleh pada saat usia dini (Al-Khluqo, 2015, h. 40-41).

2.1.3 Kebijakan Kepala Sekolah

Untuk meningkatkan suatu sekolah yang bermutu di perlukan suatu kebijakan yang tepat dengan membuat suatu program program sesuai dengan tujuan sekolah yaitu visi dan misi. Kebijakan kepala sekolah terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan kepala sekolah. Sebelum kita mengetahui makna dari kebijakan kepala sekolah terlebih dahulu kita harus mengetahui makna dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan adalah terjemahan dari kata "*wisdom*" yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang atau kelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain ia dapat

pengeculiaan artinya *wisdom* atau kebijakan adalah suatu kearifan pihak yang menentukan kebijakan, dapat saja mengecualikan aturan yang baku kepada seseorang atau sekelompok orang, jika mereka tidak dapat dan tidak meungkin tadi, dengan kata lain dapat di kecualikan tetapi tidak melanggar aturan (Syafaruddin & Asrul, 2015, h. 14).

Hal ini kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Menurut Gamage dan Pang yang dikutip oleh Sagala (2009, h. 75), dalam kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang laus untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program. Sedangkan Nichols dalam Syafaruddin (2008, h. 76) kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan yang berulang ulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan aturan keputusan.

Adapun menurut penulis, kebijakan adalah hasil keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah atau madrasah dalam mengambil suatu keputusan baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan masa depan sekolah yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Selain itu pengambilan keputusan atau kebijakan tidak bisa

dipisahkan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu bagian terpenting dalam manajemen.

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tanggung jawab kepala sekolah atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Kepala sekolah adalah pemimpin yang proses kehadirannya dapat dipilih secara langsung, ditetapkan oleh yayasan atau ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Damayanti yang dikutip Ali Imron (2008, h. 18), kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu “kepala” dan ”sekolah”. Kata “kepala“ dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga, sedangkan “sekolah” diartikan sebagai sebuah lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi, secara umum, kepala sekolah dapat diartikan seagai pemimpin sekolah atau satu lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran.

Maka kebijakan kepala sekolah adalah suatu ketentuan kepala sekolah yang berupa rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan serta cara bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang ingin dicapai di sekolah dalam mengambil suatu keputusan dalam rangkah meningkatkan mutu pendidikan (Imron, 2008, h. 16).

Agar kepala sekolah mampu bergerak dari pemimpin level bawah sampai level yang lebih tinggi dibutuhkan empat (4) unsur yaitu;

- 1) Kepala sekolah harus memiliki visi yang baik dan terbuka agar mampu menerima berbagai hal yang baru, walaupun mungkin bertentangan dengan apa yang diyakininya.
- 2) Unsur keberanian, kepala sekolah yang mencintai pekerjaannya akan memiliki keberanian yang tinggi dan berani mengambil resiko.
- 3) Kemampuan untuk bekerja dalam alam yang realistik, harus dapat membedakan mana opini dan mana yang fakta.
- 4) Harus memiliki kemampuan menjadi pemimpin, tidak sekedar pemimpin legalitas, adalah memiliki kepedulian dan sensitivitas yang tinggi tetapi mengedapankan nilai-nilai luhur, cinta, kasih sayang dan integritas, komitmen dalam memimpin agar memperoleh kepercayaan (Imron, 2008, h. 18).

Oleh karena itu, mutu kepala sekolah sebaiknya diarahkan kepada pembentukan kepala sekolah yang efektif, namun peningkatannya sebaiknya diawali pengembangan standar kompetensi kepala sekolah yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menjamin mutu pelayanan pendidikan dan mutu manajemen pendidikan, maka pengembangan standar kompetensi kepala sekolah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Menjamin keberhasilan sekolah dalam

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan (Muhaimin dkk, 2009, h. 32-33).

Di samping itu, hal penting yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah adalah membangun visi yang telah dimiliki oleh sekolah dengan mensosialisasikan, mengkomunikasikan, menghidupkan, bahkan mengembangkan visi tersebut agar mempunyai arti, bermakna bagi kehidupan sekolah dengan mengembangkan standar kompetensi kepala sekolah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. menjamin keberhasilan sekolah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Jika melihat dalam konsep kepemimpinan dalam Islam bahwa kepemimpinan merupakan suatu hal yang harus ada dalam aktivitas kehidupan umat manusia. Tanpa adanya kepemimpinan, maka tatanan dunia akan kacau dan penuh dengan masalah. Olehnya itu, sejak Islam diturunkan untuk manusia, selalu mementingkan urusan kepemimpinan.

Nabi Muhammad, para sahabatnya, hingga kepemimpinan setelahnya, terus berusaha memberi kepemimpinan yang terbaik. Karena pentingnya kepemimpinan ini, Allah SWT. menyebutkan secara khusus ayat yang terkait dengan kepemimpinan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ

فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Ketika Allah swt memberitahukan kepada para malaikat-Nya) bahwa Dia akan menjadikan Adam a.s. sebagai khalifah) di bumi, maka para malaikat itu bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi, padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih patut memangku jabatan itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan menyucikan Allah swt. Allah swt tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan Dia menjawab bahwa Dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Segala yang akan dilakukan Allah swt adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmah-Nya yang Mahatinggi walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Adam a.s. menjadi khalifah di bumi.

Yang dimaksud dengan kekhalifahan Adam a.s. di bumi adalah kedudukannya sebagai khalifah di bumi ini, untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya, dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan

segala apa yang ada padanya. Pengertian ini dapat dikuatkan dengan firman Allah: "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi" (Shad/38: 26). Sebagaimana diketahui Daud a.s. di samping menjadi nabi juga menjadi raja bagi kaumnya. Ayat ini merupakan dalil tentang wajibnya kaum Muslimin memilih dan mengangkat seorang pimpinan tertinggi sebagai tokoh pemersatu antara seluruh kaum Muslimin yang dapat memimpin umat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di bumi ini.

Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh tokoh pimpinan yang dimaksudkan itu, antara lain ialah: adil serta berpengetahuan yang memungkinkannya untuk bertindak sebagai hakim dan mujtahid, tidak mempunyai cacat jasmaniah, serta berpengalaman cukup, dan tidak pilih kasih dalam menjalankan hukum-hukum Allah.

2.1.4 Tujuan Kebijakan Pendidikan

Suyadi dan Ulfah (2013, h. 17) mengatakan,

Pendidikan anak usia dini (PAUD) pada hakikatnya ialah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak.

Wiyani dan Barnawi (2012, h. 78) berpendapat tentang tujuan pendidikan anak usia dini sebagai berikut,

Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai

persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara khusus, tujuan pendidikan anak usia dini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) agar anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu beribadah serta mencintai sesamanya.
- 2) agar anak mampu mengelolah keterampilan tubuhnya, termasuk gerakan motorik kasar dan motorik halus, serta mampu menerima rangsangan sensorik.
- 3) anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif sehingga dapat bermanfaat untuk berpikir dan belajar.
- 4) anak mamapu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab-akibat.
- 5) anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat, menghargai keragaman sosial dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri yang positif dan kontrol diri.
- 6) anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, berbagai bunyi serta menghargai karya kreatif.

Puskur dalam Suyadi dan Ulfah (2013, h. 19) menjelaskan tentang tujuan pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut,

Secara umum tujuan Pendidikan Anak Usai Dini ialah memberikan stimulasi atau rangsangan begi perkembangan potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam hal ini posisi Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap.

Selain dari pemaparan di atas, tujuan PAUD menurut UNESCO ECCE (*Early Childhood Care and Education*) dalam Suyadi dan Ulfah (2013, h. 20) adalah sebagai berikut:

.....tujuan PAUD antara lain sebagai berikut. 1. PAUD bertujuan untuk membangun fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. 2. PAUD bertujuan menanam investasi SDM yang menguntungkan, baik bagi keluarga, bangsa, negara, maupun agama. 3. PAUD bertujuan untuk menghentikan roda kemiskinan. 4. PAUD bertujuan turut serta aktif menjaga dan melindungi hak asasi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang.

Jadi, selain mempersiapkan anak untuk memasuki pendidikan ke jenjang dasar, tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak dan mengembangkan potensi serta bakat yang ada pada diri anak usia dini.

Tujuan dilakukannya kebijakan dilihat dari ruang lingkup waktunya terdapat tiga jenis perencanaan nasional pendidikan yang perlu dibuat secara teratur dan sinambung. Ketiga jenis kebijakan tersebut meliputi kebijakan jangka panjang, menengah dan pendek.

1) Kebijakan Jangka Panjang (periode 25 tahun)

Kebijakan jangka panjang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bersifat prospektif (antisipasi masa depan), yaitu kebijakan negara dibidang pendidikan yang ditentukan oleh suatu

proyeksi pendidikan dalam suatu cakupan waktu ke depan. Perencanaan ini dimaksudkan untuk menghasilkan skenario masa depan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia yang perlu diciptakan pada akhir kurun waktu pembangunan jangka panjang kedua (Suryadi dan Tilaar, 1994, h. 75).

2) Kebijakan Jangka Menengah

Rencana pembangunan (repelita) lima tahun sektor pendidikan disusun dengan jabaran yang telah operasional, menjadi kebijakan, program-program dan sasaran pembangunan masing-masing program pembangunan. Secara umum, gambaran repelita dapat digunakan sebagai berikut:

- (1) Arah dan kebijakan repelita.
- (2) Keadaan dan masalah, masalah-masalah pokok yang disimpulkan dari keadaan pendidikan sebagai hasil dari penilaian dan kajian pelaksanaan pendidikan dalam repelita sebelumnya.
- (3) Kebijaksanaan dan langkah-langkah, Kebijakan ini dikembangkan berdasarkan analisis terhadap keadaan masalah pendidikan sekarang dan perkiraan dalam lima tahun mendatang.
- (4) Program dan sasaran, jika kebijakan yang dirumuskan di atas telah dilaksanakan (Suryadi dan Tilaar, 1994, h. 77).

3) Kebijakan Jangka Pendek

Dalam perencanaan tahunan, masing-masing meliputi empat periode dengan lama tiga bulan untuk tiap periode yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, tahap persiapan perencanaan, tahap ini merupakan persiapan data khususnya yang berkaitan dengan jumlah peserta didik yang akan dilayani, kepegawaian, sarana dan prasarana yang diperlukan serta peralatan yang dibutuhkan.

Kedua, periode ini merupakan waktu untuk merumuskan dan mempublikasikan kebijakan.

Ketiga, urusan proyek dan penetapan pagu anggaran. Periode untuk melaksanakan usulan anggaran proyek.

Keempat, dalam periode ini persiapan pelaksanaan proyek pembangunan telah dilaksanakan dan persiapan untuk siklus perencanaan tahun berikutnya mulai dirintis dan dilaksanakan. Proses perencanaan dan pengambilan kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan siklus yang paling menentukan jika analisis kebijakan ingin memberikan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan (Suryadi dan Tilaar, 1994, h. 82).

Fungsi kebijakan pendidikan adalah untuk mengarahkan kegiatan yang akan dilaksanakan kedepan agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien serta sebagai pedoman bertindak dalam suatu organisasi agar kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan. Sedangkan tujuan dibuatnya kebijakan adalah untuk melakukan dan

mengarahkan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.1.5 Komponen Kebijakan

2.1.5.1 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang kebijakan-kebijakan yang baru. Perumusan masalah adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil atas beberapa pertimbangan baik dari pertimbangan tujuan, strategi, maupun kepentingan lingkungan eksternal (Dunn, 1999, h. 226).

Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses dengan empat fase yang saling tergantung, yaitu:

- 1) Pencarian masalah (*problem search*) proses penemuan dan penyatuan beberapa representasi masalah yang dihasilkan oleh para pelaku kebijakan.
- 2) Pendefinisian masalah (*problem definition*) proses mengkarakteristikkan masalah-masalah substantif kedalam istilah-istilah yang paling dasar dan umum.
- 3) Spesifikasi masalah (*problem specification*) tahap pemahaman masalah dimana analisis mengembangkan representasi masalah substantif secara formal (logis).

- 4) Pengenalan masalah (*problem sensing*) tahap perumusan masalah dimana analisis mengalami kekhawatiran yang campur aduk dan gejala ketegangan dengan cara mengenali situasi masalah (Dunn, 1999, h. 227).

2.1.5.2 Peramalan

Peramalan (*forecasting*) adalah suatu prosedur untuk membuat informasi yang faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tentang masalah kebijakan ramalan mempunyai tiga bentuk utama, yaitu:

- 1) Proyeksi adalah ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan,
- 2) Sebuah prediksi adalah ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik yang tegas. Sifat terpenting dari prediksi adalah menspesifikasikan kekuatan penyebab dan akibat yang diyakini mendasari suatu hubungan
- 3) Suatu perkiraan adalah ramalan yang didasarkan pada penilaian yang informatif atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat di masa depan (Dunn, 1999, h. 291-292).

2.1.5.3 Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai sasarannya. Dalam rekomendasi kebijakan maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prakondisi untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

- 1) Komunikasi, pemimpin harus mengkomunikasikan kepada bidang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan supaya mereka memahami kebijakan yang menjadi tanggungjawabnya.
- 2) Sumber daya manusia harus mendukung pelaksanaan kebijakan, jika SDM tidak mendukung maka menghambat pelaksanaan kebijakan.
- 3) Disposisi atau pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan harus ditetapkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, serta komitmen melaksanakan kebijakan yang dimaksud
- 4) Struktur birokrasi, koordinasi menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan kebijakan (Syafaruddin, 2008, h. 91-92).

2.1.5.4 Pemantauan

Pemantauan atau monitoring menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat kebijakan yang diambil sebelumnya. Pemantauan (*monitoring*) merupakan

prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Pemantauan memiliki empat fungsi dalam analisis kebijakan yaitu:

- 1) Kepatuhan (*compliance*) pemantauan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan para administrator program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat.
- 2) Pemeriksaan (*auditing*) pemantauan membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu telah sampai pada mereka.
- 3) Akuntansi (*monitoring*) menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
- 4) Eksplanasi pemantauan juga menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan public dan program berbeda (Dunn, 1999, h. 20).

2.1.5.5 Evaluasi

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah dapat terselesaikan tetapi juga menyumbang pada

klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam kebijakan publik (Syafaruddin, 2008, h. 96).

Ada beberapa fungsi evaluasi di antaranya yaitu:

- 1) Evaluasi memberi informasi yang falit dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.
- 2) Evaluasi kebijakan memberi sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- 3) Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi (Syafaruddin, 2008, h. 97).

Dalam proses pembuatan kebijakan/analisis kebijakan maka harus memperhatikan lima komponen yaitu: perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan serta evaluasi. Kelima komponen tersebut saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lainnya, karena kelima komponen tersebut dapat berguna untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relefan dengan kebijakan dalam berbagai konteks pendidikan.

2.2 Konsep Peningkatan Mutu

2.2.1 Pengertian Mutu

Mutu atau kualitas memiliki definisi yang bervariasi dari yang konvensional sampai yang lebih strategi. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: performansi (*performance*), keandalan (*reliability*), mudah dalam menggunakan (*easy of use*), estetika (*esthetic*) dan sebagainya. Definisi strategi dari mutu adalah suatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*) (Gasperz, 2005, h. 4). Selanjutnya, Gasperz melanjutkan, dalam ISO 8402 (*Quality Vocabulary*), kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikkan atau ditetapkan. Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) atau konformansi terhadap kebutuhan atau persyaratan (*conformance to the requirement*). Di sini produk dapat berbentuk (*tangible*), tak berbentuk (*intangibile*) atau kombinasi keduanya.

Sedangkan Dessler (2003, h. 261) mengartikan kualitas sebagai totalitas tampilan dan karakteristik sebuah produk atau pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dicari. Dengan kata lain, kualitas mengukur bagaimana baiknya sebuah produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelangganya. Menurut Arcano, mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki

kualitas yang dihasilkan. Di sini fokus mutu didasari upaya positif yang dilakukan individu atau bagian dari rangkaian kerja yang mana merupakan proses unik yang memberikan sumbangan pada penciptaan keluaran. Upaya mendefinisikan kualitas telah dilakukan oleh para "guru" atau pakar manajemen kualitas.

Tunggal (2002, h. 58) mengutip pendapat Juran bahwa kualitas sebagai kecocokan untuk pemakaian (*fitness for use*), definisi ini menekankan orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan. Pengertian cocok untuk pelanggan ini mengandung 5 dimensi utama, yaitu kualitas desain, kualitas kesesuaian, ketersediaan, keamanan dan *field use*. Juran sangat terkenal dengan konsep trilogi kualitas, yaitu: perencanaan kualitas (*quality planning*), pengendalian kualitas (*quality control*), dan perbaikan atau peningkatan kualitas (*quality improvement*).

Juran dalam Sallis (2010, h. 108) mengatakan bahwa upaya pencapaian mutu merupakan upaya menciptakan kesesuaian dengan tujuan dan manfaat. Ide ini menunjukkan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan mungkin sudah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, tetapi belum tentu sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan.

Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), konformansi terhadap kebutuhan atau persyaratan (*conformance to the requirements*) dan upaya perubahan ke arah perbaikan terus menerus (*continuous improvement*). Menurut Sallis, definisi relatif tentang kualitas memiliki dua aspek yaitu pertama

adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi dan kedua adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Aspek yang pertama merupakan definisi produsen tentang mutu, sedangkan aspek yang kedua adalah definisi mutu dari pelanggan.

Susilo (2003, h. 8) menjelaskan definisi mutu menurut Crosby sebagai kesesuaian terhadap persyaratan (*Quality has to be defined as conformance to requirements*). Dalam ISO 9001, mutu didefinisikan sebagai *The totality of features and characteristic of a product, or a service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs*. Pandangan Deming sebagaimana dikutip oleh Nasution (2015, h. 2-3) menyatakan, bahwa kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Apabila juran mendefinisikan kualitas sebagai *fitness for use* dan Crosby sebagai *conformance to requirement* maka Deming mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Feigenbaum menyatakan, bahwa kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu produk berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk. Gaevin dan Davis menyatakan, bahwa kualitas adalah suatu kondisi yang berkelanjutan yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen.

Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, namun dari kelima definisi di atas terdapat beberapa kesamaan, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut:

1. Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan
2. Kualitas mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan.
3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang) (Nasution, 2015, h. 3).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Maksud derajat atau tingkat berarti selalu ada peningkatan setiap saat.

2.2.2 Mutu Lembaga Pendidikan

Pendidikan bermutu adalah dambaan setiap orang ataupun lembaga. Masyarakat dan orang tua mengharapkan agar anaknya mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan dapat bersaing dalam memperoleh berbagai peluang yang ada. Pemerintah mengharapkan setiap lembaga pendidikan berkualitas, karena dengan pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan memberi pengaruh terhadap pembangunan negara ini. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas baik industri bisnis maupun lembaga lainnya akan secara tidak langsung akan

mempengaruhi kinerja industri bisnis maupun lembaga (Ali, 2009, h. 331).

Mutu atau kualitas pendidikan merupakan standar yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan untuk memenuhi persyaratan dan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan pelanggan atau masyarakat untuk memuaskannya. Mutu selalau diikuti sifat-sifat istimewa seperti baik, benar, dan indah. Untuk mengetahui apakah suatu produk itu bermutu atau tidak, ada dimensi yang perlu diperhatikan untuk memudahkan dalam melihat dimensi mutu suatu industri produk maupun jasa. Mutu di bidang pendidikan meliputi 4 mutu *input*, proses, *output*, dan *outcome*, yaitu :

- 1) *Input* pendidikan dinyatakan bermutu apabila telah berproses (KBM) di lembaga pendidikan.
- 2) Proses pendidikan bermutu jika mampu menciptakan suasana yang aktif, kreatif dan juga menyenangkan di lingkungan lembaga pendidikan.
- 3) *Output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar dalam bidang akademik dan nonakademik siswa tinggi.
- 4) *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan lembaga pendidikan cepat terserap di jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang favorit, di dunia kerja, gaji yang wajar, dan semua pihak mengakui kehebatannya, lulusannya dan merasa puas.

2.2.3 Dimensi Mutu

Garvin yang dikutip oleh Nasution (2015, h. 3-4) mengidentifikasi delapan dimensi kualitas yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas, yaitu sebagai berikut:

1. Performa (*performance*), berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. Misal, performansi dari produk mobil adalah kecepatan, kenyamanan dan pemeliharaan.
2. Keistimewaan (*features*), merupakan aspek kedua yang menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Misal, *features* untuk produk mobil adalah atap yang bisa dibuka. *Features* merupakan ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau pelengkap.
3. Keandalan (*reliability*), berkaitan dengan kemungkinan suatu produk berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Misal, keandalan mobil adalah kecepatan.
4. Konformansi (*conformance*), berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.
5. Daya tahan (*durability*), merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Karakteristik ini berkaitan dengan daya tahan dari produk itu.
6. Kemampuan pelayanan (*service ability*), merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan/kesopanan, kompetensi, kemudahan serta akurasi dalam perbaikan.
7. Estetika (*aesthetics*), merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subyektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pikiran individual.
8. Kualitas yang dipersepsikan (*perceived quality*), bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk, seperti meningkatkan harga diri.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi mutu atau kualitas terdiri dari performa, keistimewaan, keandalan, konformansi, daya tahan, kemampuan pelayanan, estetika, dan kualitas yang dipersepsikan. Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi ukuran kualitas adalah kepuasan pelanggan pendidikan di RA

Asy-Syafi'iyah Kota Kendari. Pelanggan yang dimaksudkan adalah orang tua/wali siswa.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Mutu

Prinsip-prinsip dalam mutu adalah bagaimana melakukan apa yang penting dan bagaimana melakukan apa yang harus dilakukan. Prinsip mutu terdiri dari: fokus pelanggan, perbaikan yang terusmenerus, pemberdayaan karyawan, patok duga, *just in time* dan *tool* untuk manajemen mutu terpadu (Ma'arif & Tanjung, 2011, h. 129). Berikut ini adalah penjelasan prinsip-prinsip mutu atau kualitas:

1. Fokus pelanggan, menjadi kebutuhan setiap organisasi. Persolan yang sering muncul adalah organisasi tidak tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan.
2. Perbaikan yang terus menerus, menjadi falsafah Jepang yang terkenal dengan istilah *Kayzen*. Orang barat menyebutnya "*continuous improvement*" artinya tidak ada rumus final dari produk atau jasa. Nama lainnya yaitu: *zero defect*.
3. Pemberdayaan karyawan, Pemeberdayaan karyawan dalam hal KASAt (*knowledge, ability, skill and attitude*), menjadi prinsip mutu yang harus dilakukan. Karena jika ingin bermutu satu produk atau jasa harus dimulai dari karyawannya.
4. Patok duga, Patok duga menjadi prinsip mutu yang pas untuk masa depan. Organisasi dapat patok duga dalam mutu *input*, mutu proses atau mutu *output*. Patok duga harus sesuai dengan perusahaan.

Patok duga juga disebut upaya memilih praktik terbaik yang digunakan sebagai standar untuk sebuah *performance*.

5. *Just in time*, Inti dari *Just in time* (JIT) adalah pemborosan harus dihilangkan, serta mengarahkan perusahaan untuk terus memperbaiki proses dan operasi agar produksi dapat ditekan serendah mungkin tanpa mengurangi mutu yang ada.

6. *Tool* untuk manajemen mutu terpadu, Piranti dalam manajemen mutu terpadu terdiri dari: *quality function deployment* dalam hal ini *house of quality*, *taguchi technique*, *quality loss function*, *paretocharts*, *process charts*, *cause-and-effect diagrams* dan *statistical process control* (Ma'arif & Tanjung, 2011, h. 130).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip mutu dalam pendidikan adalah memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Sedangkan pelanggan dibagi menjadi dua yaitu: 1) Pelanggan internal (di dalam lembaga pendidikan, guru, selalu mendapat pelayanan yang memuaskan dari petugas TU, Kepala Sekolah selalu puas terhadap hasil kerja guru dan guru selalu menanggapi keinginan siswa), 2) Pelanggan eksternal (di luar organisasi misalnya masyarakat umum, wali murid, perusahaan, serta perguruan tinggi atau sekolah lanjutan).

2.3 Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu RA (PAUD)

2.3.1 Konsep Peningkatan Mutu RA (PAUD)

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen pendidikan (Shaleh, 2004, h. 243).

Mutu pendidikan merupakan dasar suatu kesuksesan sekolah dalam menghasilkan murid yang berkualitas. Orang tua sangat tertarik dengan sekolah yang mampu memberikan mutu kepada anak mereka. Hal ini yang mendorong dari pihak sekolah untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Sekolah akan lebih berkualitas atau bermutu apabila mempunyai guru atau tenaga pendidik yang terlatih. Guru yang terlatih dapat memahami dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi mengenai persoalan murid yang biasa di bawah umur 6 tahun. Menurut Muhson, peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, pelatihan dan pendidikan, ataupun dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran dan nonpembelajaran secara professional lewat penelitian tindakan secara terkendali (Muhson, 2008, h. 1).

Peningkatan mutu pendidikan pada anak usia dini tergantung dari faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam mencapainya. Faktor pendukung yaitu antara meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini, sehingga mereka tidak keberatan menitipkan anaknya pada TPA maupun KB walaupun dengan biaya yang cukup mahal, hal ini didukung juga gencarnya pemerintah dengan mensosialisasikan melalui dinas pendidikan atau kementerian Agama dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik untuk pengelola maupun tenaga pendidik pada lembaga PAUD, sehingga diharapkan lembaga PAUD dapat memberikan layanan yang optimal (Hiryanto dkk., 2010, h. 12).

Faktor penghambat, meliputi keterbatasan dana yang dimiliki, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendah dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, rendahnya keperdulian terhadap pendidikan anak usia dini, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini khususnya pada masyarakat pedesaan sehingga untuk mengatasi keterbatasan dana dilakukan dengan cara meminta bantuan dana dari masyarakat, melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan melalui program pengayaan, mengikutsertakan pengelola maupun pendidik dalam berbagai pelatihan maupun workshop pendidikan anak usia dini (Hiryanto dkk., 2010, h. 12).

1) Slamet dalam Bresman menjelaskan, guna menghasilkan mutu, terdapat empat usaha yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, yaitu: Menciptakan situasi “menang-menang” (*win-win*

- solution*) dan bukan situasi “kalah-menang” di antara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (*stakeholders*);
- 2) Perlu ditumbuh kembangkan motivasi instrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu;
 - 3) Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang;
 - 4) Menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, haruslah dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu (Rajagukguk, 2009, h. 79).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan PAUD adalah menggunakan sarana bermain dalam bentuk edukatif. Sarana bermain dalam bentuk Alat Permainan Edukatif (APE), sebagai sarana yang berfungsi membantu pamong dalam menciptakan situasi pembelajaran serta merangsang dalam pembentukan perilaku tertentu. Hampir semua taman penitipan anak maupun kelompok bermain telah memiliki alat permainan edukatif walupun dilihat dari jumlah dan jenisnya masing-masing lembaga sangat bervariasi, hal ini tergantung dari kemampuan lembaga tersebut, ada yang sangat lengkap, tetapi ada juga yang masih sangat terbatas. Termasuk juga ketersediaan sarana/prasarana pendukung lainnya seperti ruang belajar, ruang bermain dan perlengkapan lainnya juga sangat bervariasi (Hiryanto dkk., 2010, h. 9).

Pencapaian mutu pendidikan anak usia dini dapat diukur dengan membandingkan hasil pencapaian program dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Komponen *input*, proses dan *output*, lembaga pendidikan anak usia dini dikatakan bermutu apabila aktivitas pelayanan yang dilakukan betul-betul mengarah pada pencapaian hasil yang diharapkan dengan mendayagunakan input-input yang ada secara terpadu, harmonis dan optimal. Standar ini diantaranya meliputi kurikulum, proses pembelajaran, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, organisasi kelembagaan, administrasi dan manajemen serta lingkungan pendukung dan pembiayaan, dengan kata lain layanan PAUD bermutu manakala dapat memenuhi Standar Minimal Manajemen (SMM), Standar Minimal Tenaga Kependidikan (SMTK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Hiryanto dkk., 2010, h. 10-11).

2.3.2 Peran Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu RA

Peran kepala dapat berlangsung di dalam dan di luar organisasi. Karena itu salah satu peran strategis seseorang dalam organisasi lain sebagai manajer adalah kepemimpinan. Menurut Robbins dalam Syafaruddin dan Asrul (2014, h. 59), peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan berkaitan dengan tugas seseorang dalam kedudukan pada unit sosial. Sedangkan menurut Newel, peran adalah sama dengan perilaku dalam kedudukan tertentu dan mencakup perilaku itu sendiri dan sikap serta nilai yang melekat dalam perilaku.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan Nasional Depdiknas, terdapat tujuh peran utama kepala sekolah. Tujuh peran utama kepala sekolah tersebut, yaitu sebagai *supervisor*, *edukator*, *manager*, *administrator*, *supervisor*, *leader*, *motivator*, pencipta iklim kerja, wirausahawan, serta layanan bimbingan dan konseling (Helmawati, 2014, h. 17-18).

Dari sisi tenaga pendidik, kepala sekolah dituntut untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi guru. Kepala sekolah juga sebagai *adminstrator* dalam keuangan, sebagai *supervisor* dalam segala aspek pendidikan (8 standar pendidikan nasional) dan sebagai *leader* dalam lembaga pendidikan baik dari segi tugas maupun SDM. dan bukan hanya itu, kepala sekolah juga sebagai pencipta iklim kerja yang kondusif yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, Kepala sekolah juga berperan sebagai wirausahawan, serta berperan dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu personal sekolah (tenaga pendidik dan kependidikan beserta peserta didik) dalam menghadapi permasalahan dan berperan serta mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan cara membuat aturan atau kebijakan oleh kepala sekolah (Helmawati, 2014, h. 29).

Jadi dapat penulis simpulkan untuk meningkatkan mutu pendidikan oleh kepala sekolah harus memberikan pelayanan dan bimbingan untuk membantu personel dalam menghadapi masalah

sehingga kepala sekolah berperan untuk membuat aturan atau kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu lulusan dan merupakan peran dan tugas kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memiliki peran *leader, educator, motivator, inovator, dan administrator*.

2.3.3 Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah

Model kebijakan merupakan suatu bentuk kebijakan yang dapat di ambil atas beberapa pertimbangan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan baik dari pertimbangan tujuan, strategi maupun keperluan lingkungan. Adapaun model model kebijakan kebijakan yaitu:

2.3.3.1 Model Deskriptif

Model pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan oleh penelitian dalam ilmu pengetahuan (baik ilmu pengetahuan murni maupun terapan) untuk menerangkan sesuatu gejala yang terjadi di dalam masyarakat (Suryadi & Tilaar, 1994, h. 46). Sedangkan menurut Cohn dalam Sagala (2009), model deskriptif adalah pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan menyajikan sesuatu “*State of the art*” atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan perlu diketahui para pemakai (h. 104).

2.3.3.2 Model Normatif

Di antara beberapa jenis model normatif yang di gunakan analisis kebijakan dalam model normatif yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum tugas kepala sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan dapat memecahkan suatu masalah kebijakan. Pendekatan normatif ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan dapat menyelesaikan masalah masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat pada semua jenjang dan jenis pendidikan (Rusdiana, 2015, h. 47-48).

2.3.3.3 Model Verbal

Model verbal adalah kebijakan yang diekspresikan dalam bahasa sehari hari disini kepala sekolah membuat kebijakan adalah dengan menggunakan bahasa sehari hari yaitu dengan menggunakan ekspresi atau gaya kepemimpinan yang telah di buat tersebut.

2.3.3.4 Model Sebagai Pengganti dan Perspektif

Pendekatan model perspektif merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai memecahkan suatu masalah khususnya masalah kebijakan. Model bentuk perspektif juga biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis

data. Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Model pengganti mulai disadari atau tidak dari asumsi bahwa masalah formal adalah representasi yang sah dari masalah yang substantif. Sedangkan model perspektif didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal tidak pernah sepenuhnya mewakili secara sah masalah substantif. Hal ini penting karena pemecahan masalah pendidikan ini harus dilakukan dengan tepat, jika tidak tentu akan mendapatkan kerugian baik waktu, material, dan juga penyimpangan dari tujuan yang telah ditentukan (Rusdiana, 2015, h. 48).

Jadi, berdasarkan beberapa uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa kepala sekolah merupakan orang pemimpin yang berfungsi sebagai inovator dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan menggunakan model model yang tepat disini kepala sekolah membuat kebijakan dengan melihat hal yang terjadi sehingga dengan mudah menggunakan meodel apa untul membuat suatu keputusan.

2.3.4 Langkah-Langkah Kebijakan Kepala Sekolah

Dalam suatu kebijakan pendidikan terdapat tiga tahap kebijakan yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi. kepala sekolah sebagai petugas yang profesional di tuntutan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi dari kebijakan pendidikan tersebut adapu tiga tahap kebijakan sebagai berikut (Rusdiana, 2015, h. 49):

2.3.4.1 Formulasi Kebijakan

Formulasi adalah perumusan atau pembuatan. Jadi, formulasi kebijakan adalah pembuatan /perumusan suatu kebijakan dalam pendidikan. Berikut adalah tahap tahap dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan:

- 1) Penyusunan agenda, yakni disini menempatkan masalah pada agenda pendidikan.
- 2) Formulasi kebijakan, yakni merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.
- 3) Adopsi kebijakan, yakni kebijakan alternatif tersebut di adopsi /diambil untuk solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.
- 4) Implementasi kebijakan, yakni kebijakan yang telah diambil di laksanakan dalam pendidikan.
- 5) Penilaian kebijakan, yakni tahap ini tahap penelitian dalam pembuatan kebijakan dalam pencapaian tujuan dalam kebijakan pendidikan.

Jadi, dalam merumuskan suatu kebijakan kepala sekolah, penyusunan agenda, yakni di sini menempatkan masalah pada agenda, merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah pendidikan. Adopsi kebijakan, yakni kebijakan alternatif tersebut diadopsi/diambil untuk solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut kebijakan yang telah diambil

dilaksanakan dalam pendidikan dan yang terakhir penilaian kebijakan, yakni tahap ini merupakan tahap dalam pembuatan kebijakan dalam pencapaian tujuan dalam kebijakan pendidikan.

2.3.4.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Syarifuddin (2008, h. 86) mengutip pendapat Putt & Springer, implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam pembuatan kebijakan terwujud ke dalam praktek atau realisasinya.

Menurut Edward, Metter, dan Horn yang telah dikutip oleh Indah (2016, h. 41), terdapat lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumberdaya, kecenderungan/disposisi implementor, struktur birokrasi dan lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial ekonomi. Untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan langkah yaitu: Pertama, secara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program pendidikan. Kedua, dapat melalui kebijakan derivat (turunan) dari kebijakan pendidikan nasional tersebut (Indah, 2016, h. 86).

Berdasarkan dari paparan di atas terlihat bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah di buat oleh kepala

sekolah atau madrasah dalam bentuk suatu praktek maka akan lebih mudah bila di mulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan dengan menggunakan langkah langkah kebijakan seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam mengimplentasikan suatu kebijakan di sekolah dengan melihat faktor-faktor yang sangat penting, seperti komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana kebijakan yang segera atau di sebut sebagai “*policy performance*”. Secara kongkrit antara lain dapat kita lihat misalnya kualitas *output*, komunikasi yang baik dan sumber daya yang berkualitas yang dihasilkan oleh kepala madrasah dalam jangkah waktu tertentu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat. Perubahan dalam meningkatnya mutu pendidikan dan taraf kesejahteraan masyarakat padat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai “*policy outcome*” atau “*policy impact*” (Indah, 2016, h. 87).

Agar implementasi kebijakan dalam pendidikan berjalan dengan lancar dan sukses maka perlu dianalisis tentang peraturan yang dapat mendukung kebijakan, keuangan, personil dan prasarana lainnya yang dapat mendukung suatu pelaksanaan kebijakan begitu juga agar pendidikan disuatu sekolah bermutu dan berkualitas maka dengan membuat suatu peraturan yang

dapat mendukung kebijakan, yaitu oleh kepala sekolah dan seluruh komponen yang ada di sekolah tersebut.

2.3.4.3 Evaluasi Kebijakan

Setelah adanya pelaksanaan kebijakan kemudian diadakan pengevaluasian dalam kebijakan pendidikan tersebut. Karena dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan tersebut telah dicapai. Evaluasi kebijakan tidak hanya berfokus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan saja, akan tetapi evaluasi kebijakan mencakup evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Disini kepala sekolah melakukan suatu pemantauan kinerja, melaksanakan pengaruh evaluasi dan melaksanakan evaluasi proses guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan tersebut telah dicapai.

2.3.5 Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah

Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan meningkatkan mutu tenaga akademik secara berkelanjutan, penataan program studi, peningkatan proporsi murid bidang sains dan keteknikan, pengembangan kurikulum yang fleksibel dan terkendali, peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengadaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang, peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah,

dunia usaha, kalangan industri dan lembaga dalam dan luar negeri (Rivai dan Murni, 2010, h. 714).

Dalam lembaga pendidikan, kepala sekolah sebagai seseorang yang telah diberi wewenang untuk memimpin suatu lembaga pendidikan dan harus bertanggung jawab secara penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah yang berada di bawah pemimpinnya. Maju mundurnya suatu lembaga pendidikan itu banyak dipengaruhi oleh kepala madrasah, termasuk juga masalah peningkatan mutu pendidikan. Adapun dalam peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah dapat melaksanakannya dengan melalui beberapa komponen. Untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan adanya komponen-komponen lainnya agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut yaitu dengan adanya:

2.3.5.1 Guru

Kehadiran guru tidak akan tergantikan oleh unsur yang lain, lebih-lebih dalam masyarakat kita yang multikultural dan multidimensional, dimana peranan teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru sangat minim. Begitu pentingnya peranan guru dalam keberhasilan peserta didik maka hendaknya guru mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang ada dan meningkatkan kompetensinya sebab guru pada saat ini bukan saja sebagai pengajar tetapi juga

sebagai pengelolaan proses belajar mengajar (Nasution, 2017, h. 223-224).

Usaha peningkatan kualitas guru ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, di antaranya adalah:

1) Meningkatkan kedisiplinan guru

Untuk meningkatkan mutu pendidikan faktor kedisiplinan guru sangat diperlukan, karena program sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika guru-guru disiplin. Demikian sebaliknya jika guru-gurunya malas, maka program sekolah akan terbengkalai.

2) Meningkatkan pengetahuan guru

Untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju seperti sekarang ini, seorang guru dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuannya baik melalui kursus, membaca buku bacaan, majalah, surat kabar, dan sebagainya, atau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Syafaruddin & Asrul, 2014, h. 67).

3) *Inservice* dan *Upgrading*

Pembinaan dan usaha perbaikan pendidikan tidak mungkin berhasil tanpa disertai dengan pembinaan dan perbaikan mutu pengetahuan serta cara kerja para pelaksana yaitu guru-guru. Di antara usaha pembinaan dan perbaikan mutu pengetahuan guru tersebut dilakukan dengan *inservice*

training dan *upgrading*. Seperti apa yang diungkapkan oleh Purwanto sebagai berikut: *Inservice training* ialah “segala kegiatan yang diberikan dan diterima oleh para petugas pendidikan (kepala sekolah, guru, dan sebagainya) yang bertujuan untuk menambah dan mempertinggi mutu pengetahuan, kecakapan dan pengalaman guru-guru dalam menjalankan tugas dan kewajibanya”. Program *Inservice training* dapat mencakup berbagai kegiatan seperti mengadakan aplikasi kursus, ceramah-ceramah, workshop, seminar-seminar, kunjungan ke sekolah-sekolah di luar daerah dan persiapan-persiapan khusus untuk tugas-tugas baru (Syafaruddin & Asrul, 2014, h. 69).

Inservice training ini sangat penting bagi guru, karena jika guru itu hanya mengandalkan dari pendidikan formal yang diperoleh di sekolah keguruan dalam mempersiapkan tenaga pendidikan, maka belum merupakan persiapan yang cukup lengkap dan memadai, juga adanya kurikulum sekolah yang mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat dan kebudayaan. Di samping itu, adanya suatu kenyataan, bahwa karena adanya suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan demikian untuk meningkatkan kualitas guru sebagai tenaga pengajar dan tenaga pendidik *inservice* sangat

diperlukan. Sedangkan *upgrading* (penataran) sebenarnya tidak berbeda jauh dengan *inservice training*. *Upgrading* merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ilmu pengetahuan dan kecakapan para pegawai, guru atau petugas pendidikan lainnya, sehingga dengan demikian keahlian bertambah dan mendalam (Syafaruddin & Asrul, 2014, h. 70).

4) Rapat Guru

Rapat guru adalah suatu cara dalam rangka meningkatkan kualitas guru di dalam mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik. Salah satu bentuk rapat guru yang dilaksanakan oleh kepala sekolah ialah konferensi atau musyawarah yang bertujuan untuk membimbing guru-guru agar lebih efektif dalam perbaikan pengajaran di sekolah (Syafaruddin & Asrul, 2014, h. 54).

2.3.5.2 Siswa

Siswa merupakan hal yang terpenting dalam suatu pendidikan tanpa siswa suatu sekolah tidak akan maju. dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa juga harus mendapatkan perhatian, peningkatan mutu atau kualitas siswa ini dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1) Mengaktifkan Siswa

Mengaktifkan siswa ini dilakukan dengan cara misalnya dengan mengabsen siswa setiap kali akan

memulai dan akhir pelajaran berlangsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti siswa meninggalkan sekolah (bolos) sebelum jam pelajaran selesai dan lain-lain.

2) Memberikan Bimbingan

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan di dalam belajar, siswa membutuhkan bimbingan. Banyak siswa yang tidak mendapatkan nilai yang baik dalam pelajarannya (di sekolah) karena tidak mengetahui cara-cara belajar yang efektif dan efisien. Maka dalam mengusahakan agar siswa mempunyai ketarampilan belajar yang baik perlu kiranya seorang guru memberi bimbingan yang berupa petunjuk tentang cara belajar yang baik. Kemudian untuk memberi kebiasaan belajar yang baik bimbingan itu hendaknya diberikan sewaktu-waktu anak mempelajari pelajaran yang disajikan. “Hasilnya lebih baik bila bimbingan itu diberikan sewaktu anak mempelajari pelajaran yang disajikan” menurut uraian di atas bimbingan guru yang berupa tentang cara belajar yang baik perlu diberikan kepada siswa dengan demikian maka prestasi siswa dapat meningkat (Syafaruddin & Asrul, 2014, h. 7).

3) Pemberian Tugas pada Siswa Mengadakan Kegiatan Ekstra Kurikuler

Untuk meningkatkan kualitas siswa pemberian tugas perlu diberikan. Karena hal ini akan dapat merangsang belajar siswa. Dalam menunjang keberhasilan siswa dalam belajar, maka kegiatan kurikuler perlu diadakan, baik bidang olah raga, pramuka, kesenian, keagamaan maupun kegiatan lain yang berguna bagi siswa.

2.3.5.3 Sarana Prasarana

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dibutuhkan sarana yang memadai dengan sarana yang cukup maka akan memudahkan pencapaian tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat di pengaruhi oleh kondisi saran dan prasarana pendidikan yang di miliki sekolah oleh optimalisasi dan pemanfaatannya (Matin dan Fuad, 2016, h. 1).

2.3.5.4 Kerjasama dengan Wali Murid

Penyelenggaraan pendidikan akan lebih berhasil jika adanya kerja sama antara sekolah dengan orang tua murid, di mana sekolah akan memberi informasi tentang keadaan

anaknya dirumah sehingga hubungan mereka itu adalah saling menunjang di dalam keberhasilan belajar siswa (Purwanto, 1984, h. 68).

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adanya program-program pendidikan di sekolah guru dengan meningkatkan kedisiplinan guru, meningkatkan pengetahuan, dan pembinaan pelatihan kinerja guru di samping itu juga upaya meningkatkan mutu adanya siswa dengan memberikan bimbingan, serta tersedianya sarana prasarana guna mendukung proses pembelajaran dan dan adanya kerja sama dengan wali murid.

2.4 Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini. Namun, ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rasmi (2015, h. 54) dengan judul “Peningkatan Mutu dan Profil Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Total Quality Management (TQM)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam manajemen mutu terpadu dalam pendidikan harus menempatkan pelanggan dan produk sebagai perhatian utama. Oleh karena itu, perlunya pengembangan kurikulum secara terus menerus berdasarkan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Dimana pelanggan utama pendidikan adalah peserta didik yang menerima pelayanan pendidikan dan latihan,

sedangkan produknya adalah peluang pembelajaran yang harus tercapai keperluan yang elemennya adalah kurikulum dan sumber daya pembelajaran.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli (2015, h. 171) dengan judul “Eksistensi Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah di Provinsi Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan rencana jumlah dan alokasi akreditasi sekolah/madrasah, pengumuman pendaftaran akreditasi, pengusulan untuk akreditasi, penyampaian perangkat akreditasi, pengisian instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, pengiriman isian instrumen akreditasi, evaluasi isian instrumen dan audit dokumen, penetapan kelayakan, visitasi ke sekolah/madrasah, validasi proses dan hasil visitasi, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi, penerbitan sertifikat akreditasi, pelaporan data dan sosialisasi hasil akreditasi sekolah/madrasah, dan telah berhasil mengakreditasi S/M sepanjang tahun 2006-2014 sebanyak 5.660 sekolah/madrasah, yakni 5.109 sekolah atau 90,3% dan 551 madrasah atau 9,7%, dan potret penjaminan mutu pendidikan, BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai lembaga yang mengakreditasi Sekolah/Madrasah sebagai salah satu komponen peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah adalah terbentuknya pengurus BAP S/M Provinsi Sulawesi

Tenggara, Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kab/Kota, terjalinnya koordinasi yang baik dengan Diknas dan Depag, asesor yang cukup dalam berbagai jenjang pendidikan, tersedianya anggaran yang memadai dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan faktor penghambat adalah kesadaran pemimpin madrasah masih rendah dan masih ada di antaranya yang belum mengetahui adanya akreditasi madrasah, serta lemahnya manajemen madrasah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ardin dan Badarwan (2018, h. 117) dengan Judul “Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dalam Peningkatan Keunggulan Bersaing”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketiga SMK S mengimplementasikan manajemen pengembangan mutu sehingga mereka mampu bersaing dengan SMK Negeri. Selain itu juga, ada muatan agama yang diberikan dan kerjasama tim yang solid dan bertanggungjawab.

Faktor-faktor keberhasilan dari ketiga SMK ini adalah manajemen yang tertata dalam setiap hal, SDM handal, hubungan yang baik dengan lingkungan kerja, dan kebijakan-kebijakan yang matang. Kontribusi manajemen pengembangan mutu terhadap prestasi yang dicapai SMK S dalam peningkatan keunggulan bersaing adalah menjalankan tanggung jawab dan wewenang dengan baik, tanggung jawab manajemen, penetapan standar kerja, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Dengan demikian, pengimplementasian manajemen pengembangan mutu di SMK Swasta telah dapat menjadikan sekolah bermutu yang dapat meningkatkan keunggulan bersaing di Provinsi Jambi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2015, h. ii) dengan judul “Peningkatan Mutu Pendidikan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fatimah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan PAUD Fatimah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo meliputi: 1) Peningkatan keaktifan guru, kepala sekolah dan administrasi manajemen dalam mengikuti pelatihan maupun seminar, 2) Peningkatan sumber daya manusia dengan pembiasaan dan kemampuan dasar sehingga siswa mampu mengendalikan diri dan berkarakter kuat, 3) Faktor pendukung peningkatan mutu pendidikan pada PAUD Fatimah yaitu adanya tujuan sekolah, adanya guru; kepala sekolah; dan tenaga administrasi yang profesional di bidangnya, adanya siswa aktif; cerdas dan kreatif, adanya penyempurnaan dan peningkatan sumber daya yang telah ada (dana, kurikulum, sarana dan prasarana), dan adanya suasana lingkungan yang kondusif seperti lingkungan yang bersih, serta adanya hubungan yang erat dan rasa kekerabatan antara guru, orang tua, warga sekolah ataupun satuan kerja sekolah lainnya.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini yaitu peningkatan mutu. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu dalam hal pembangunan satuan pendidikan dan pembiayaan peserta didik, waktu dan tempat penelitian. Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu RA (Studi Kasus pada RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2009, h. 53). Menurut Bogdan & Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong (2014, h. 3), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini menyajikan gambaran umum tentang subjek penelitian melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sementara itu, Kirk & Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh makna dan pemahaman budaya subjek penelitian (Purwanto, 2010, h. 21). Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana jenis penelitian tersebut menggambarkan permasalahan yang dikemukakan berdasarkan fakta nyata. Kenyataan yang berpijak pada fakta khusus,

kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Oleh karena itu, penulis akan menggambarkan kebijakan kepala sekolah dalam peningkatan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Raudhatul Athfal (RA) Aisyiyah Nurhaq, Jl. Sultan Qaimuddin No. 24A Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari. Adapun alasan penulis memilih tempat penelitian ini karena RA ini banyak diminati oleh masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Sebab, salah satu faktor lembaga pendidikan yang diminati banyak masyarakat karena lembaga tersebut dipandang sebagai lembaga yang berkualitas (bermutu). Dikatakan bermutu karena *Output* (lulusan) murid dari lembaga pendidikan tersebut terkenal berprestasi ketika sudah berada di lembaga pendidikan lain. Selain itu, sekolah ini menjadi rujukan bagi lembaga setingkat Raudhatul Athfal di Kota Kendari. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mulai 27 Februari-4 Mei 2020.

3.3 Partisipan Penelitian

Partisipan adalah semua orang atau manusia yang berpartisipasi atau ikut serta dalam suatu kegiatan. Menurut pandangan Sunarto (2003, h. 17), partisipan yaitu:

Pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan (tenaga, pikiran maupun materi) dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa partisipan adalah subyek penelitian yang dilibatkan dalam penelitian sebagai peserta dalam memberikan tanggapan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pendidikan di lembaga pendidikan. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai partisipan penelitian adalah kepala sekolah, dan guru-guru di RA. Aisyiyah Nurhaq Kota Kendari.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam melaksanakan studi lapangan, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data-data yang diperlukan, adapun metode pengumpulan data yang dimaksud adalah:

3.4.1 Interview/Wawancara

Wawancara adalah proses dalam mendapatkan keterangan yang jelas tentang suatu fenomena yang dicari atau diteliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden (Moleong, 2014, h. 172). Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kebijakan peningkatan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari. Selain itu metode wawancara juga digunakan untuk memperoleh data tentang kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu RA. Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan wawancara secara langsung dengan pihak terkait, tentunya orang-orang yang berkompeten dalam pengelolaan RA Aisyiyah Nurhaq, yaitu kepala

sekolah (RA) 1 orang, dan guru 6 orang. Jadi, jumlah responden yang akan diwawancarai sebanyak 7 orang.

3.4.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya (objek penelitian), seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, modul, artikel, jurnal, brosur, dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji (Sudijono, 2005, h. 36). Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data tentang gambaran umum berupa biografi sekolah, visi, misi, tujuan sekolah, dan sarana dan prasarana di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari. Dalam hal ini penulis meminta bantuan kepada orang-orang yang terkait, tentunya orang-orang yang berkompeten dalam pengelolaan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.

3.4.3 Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono, 2014, h. 158). Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui kebijakan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari. Dalam observasi peneliti mencari data-data yang diinginkan agar data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang ada, dalam observasi peneliti dibantu oleh kepala sekolah, guru, staf. Kegiatan yang akan diobservasi

adalah keadaan sarana dan prasarana, peserta didik (murid), dan kegiatan pembelajaran di kelas.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan cara mencari makna (*meaning*) (Muhadjir, 2002, h. 104). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif, yang memiliki sifat uraian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Analisa data adalah kegiatan mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam suatu penelitian. Adapun cara mengambil kesimpulan bisa dengan hipotesis maupun dengan estimasi hasil. Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif (*interactive model of analysis*) yang terdiri dari tiga komponen analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*data conclusion: drawing/verifying*) (Miles & Huberman, 1994, h. 20). Proses ketiga komponen tersebut merupakan siklus, dimana proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan itu merupakan rangkaian analisis secara berurutan dan saling susul menyusul.

Berdasarkan model analisis interaktif tersebut, maka analisis data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peneliti datang ke lokasi penelitian untuk keperluan wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam rangka mengumpulkan data-data yang terkait dengan masalah penelitian.
2. Data-data yang telah terkumpul, selanjutnya direduksi, dipilah-pilah, dan diklarifikasikan secara sistematis untuk kemudian disajikan.
3. Data hasil sajian kemudian dianalisis, hasil analisis ini kemudian direduksi agar simpulan yang diambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
4. Setelah diadakan reduksi data, kemudian data disajikan sebagai simpulan akhir dalam bentuk deskriptif atau gambaran yang tentunya juga dilengkapi dengan data-data pendukung untuk kesempurnaan hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti halnya yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Terdapat tiga cara dalam mereduksi data, yaitu: 1) Seleksi ketat atas data; 2) Ringkasan atau uraian singkat; dan 3) Menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.

3.5.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Teks naratif: berbentuk catatan lapangan; dan 2) Matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

3.6 Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas interbal), *trasfermability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), *confirmability* (obyektifitas). Untuk menguji keabsahan data disini penulis menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan: Perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, uji analisis kasus negatif, menggunakan data referensi, dan mengadakan *member check* (Sugiyono, 2017, h. 121).

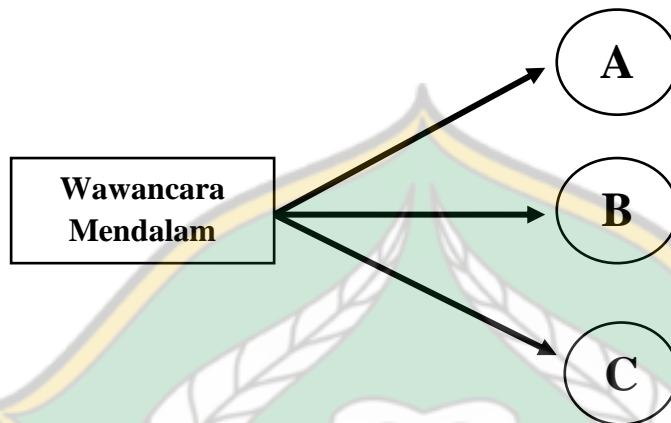
Jadi, di sini penulis menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan penulis adalah pemeriksaan dengan sumber yang lainnya. Penulis membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif (Moleong, 2014, h. 178).

Metode yang digunakan untuk pemeriksaan data adalah metode triangulasi data yaitu dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek data atau informasi yang diperoleh dari dokumen dengan hasil observasi dan wawancara. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

3.6.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*). Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



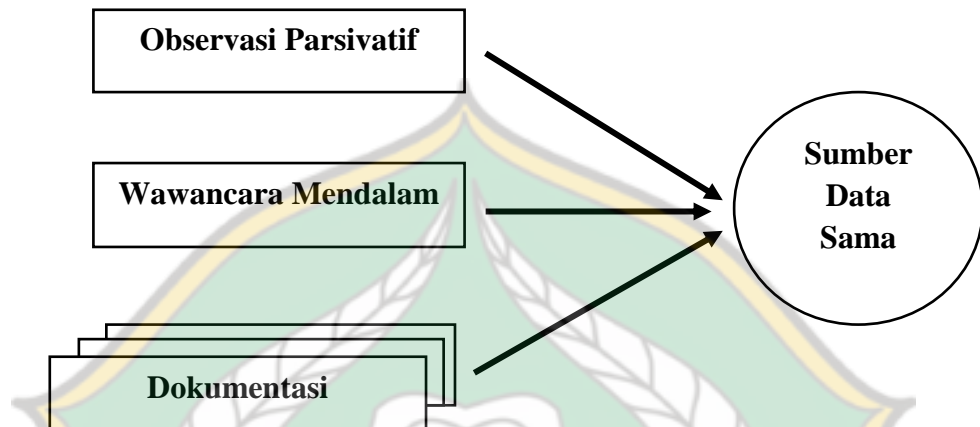
Gambar 3.1 Triangulasi Sumber (Sugiyono, 2017, h. 331)

3.6.2 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda (Sugiyono, 2017, h. 274).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, Serta dokumentasi untuk sumber

data yang sama secara serempak. Triangulasi teknik dapat ditempuh dengan langkah-langkah seperti pada gambar berikut:

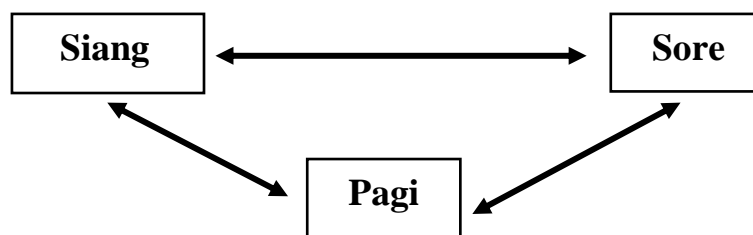


Gambar 3.2 Triangulasi Teknik (Sugiyono, 2017, h. 331)

3.6.3 Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiono, 2017, 274).

Adapun triangulasi waktu dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Triangulasi Waktu (Sugiyono, 2017, h. 332)

Adapun triangulasi data yang dilakukan peneliti di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan guru,
2. Membandingkan apa yang dikatakan guru yang satu dengan guru yang lain,
3. Membandingkan keadaan perspektif seorang guru dengan berbagai pendapat guru lain,
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang ada kaitannya dengan RA.

Hal itu dapat dicapai dengan jalan membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan kepala sekolah terkait dengan wawancara mengenai kebijakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dengan apa yang diobservasi penulis apakah hasil wawancara sudah sesuai dengan data yang ditemukan oleh penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Proses Kebijakan Kepala Sekolah di RA Aisyiyah Nurhaq

Dalam merumuskan kebijakan kepala RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari, semua kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah tidak terlepas dari keputusan bersama. Semuanya dipikirkan dan dirumuskan secara adil dan bijaksana oleh kepala sekolah dengan cara musyawarah (rapat). Kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah menggunakan langkah-langkah yang tepat seperti dengan perencanaan perumusan program yang dinyatakan dengan istilah formulasi, mengorganisasikan program, melalui *job discription* dan kemudian pelaksanaan (impelementasi) program kebijakan dan disertai dengan pengawasan yaitu dengan evaluasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah yaitu adanya program sistem *full day school*, bimbingan ibadah dan program ekstrakurikuler apakah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat.

Pelaksanaan kebijakan oleh kepala sekolah dilaksanakan dalam bentuk program-program sekolah seperti program menjadikan Sekolah bermutu, mengembangkan potensi spiritual siswa berupa bimbingan ibadah, program *full day school*, dan program ekstrakurikuler yang ada di RA Aisyiyah Nurhaq.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari Ibu Samsia, menjelaskan tentang bagaimana proses kebijakan program *full day school* di sekolah RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan beliau mengatakan bahwa:

Proses pelaksanaan program *full day school* sebelum saya dan seluruh guru di sekolah ini membuat sistem *full day school* merupakan rencana awal untuk membangun sekolah ini dimana kegiatan pembelajaran adalah *full* kegiatannya yaitu dari jam 07.15 samapai dengan 17.00 yang merupakan suatu ketetapan dari yayasan dan saya serta para guru-guru yang ingin memajukan sekolah ini. Proses program *full day school* adalah dengan memberikan semangat terhadap guru dan para peserta didik agar mereka lebih giat dalam mengajar dan belajar sehingga mutu yang dihasilkan dapat tercapai yaitu menghasilkan lulusan-lulusan terbaik atau unggul seperti yang tertera dalam visi dan misi sekolah. Saya juga akan selalu mengevaluasi apakah berjalan program yang saya buat, jika program yang saya buat menagalami masalah maka saya akan mengantisipasi dengan melihat masalah apa yang terjadi (Hasil Wawancara, 29 Februari 2020).

Guru kelas Risnawati menjelaskan tentang proses kebijakan kepala sekolah. Proses kebijakan program sistem *full day school* di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari dalam rangkah meningkatkan mutu pendidikan beliau mengatakan bahwa:

Proses kebijakan kepala sekolah yang beliau buat adalah melakukan perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan dan melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang beliau buat (Hasil Wawancara, 02 Maret 2020).

Sejalan dengan pernyataan di atas, yang diwawancarai peneliti juga memberikan jawaban yang sama tentang kebijakan yang dibuat

untuk meningkatkan mutu pendidikan, Guru Kelas Ibu Raminatin mengatakan bahwa:

Proses kebijakan yang beliau programkan adalah melakukan perencanaan, mengorganisasikannya, melaksanakan dan melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan program tersebut berupa sistem *full day school*, bimbingan ibadah dan ekstrakurikuler (Hasil Wawancara, 07 Maret 2020).

Selanjutnya pendapat dari Guru Kelas Ibu Fitriani berdasarkan wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa:

Seperti yang saya lihat proses kebijakan kepala sekolah yang beliau buat adalah melakukan perencanaan, mengorganisasikan, mengimplemtasi dan melakukan evaluasi program tersebut berupa sistem *full day school*, bimbingan ibadah dan ekstrakurikuler beliau melakukannya dengan baik (Hasil Wawancara, 07 Maret 2020).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, proses kebijakan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melakukan perencanaan atau perumusan kebijakan yang dibuat kemudian melakukan pengorganisasi yaitu bekerjasama agar kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan dan mengimplementasikan, yaitu menjalankan kebijakan yang dibuat serta yang terakhir adalah melakukan eveluasi yang mana program tersebut adalah program sistem *full day school*, bimbingan ibadah dan program ekstrakurikuler agar dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien.

4.1.2 Mutu Pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq

Mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dalam mengelola dan memproses pendidikan secara berkualitas dan

efektif untuk meningkatkan nilai tambah agar menghasilkan *output* yang berkualitas. *Output* yang dihasilkan oleh pendidikan yang bermutu juga harus mampu memenuhi kebutuhan *stakholder* dan seluruh komponen-komponen yang ada di sekolah tersebut termasuk masyarakat. Mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, dan masyarakat) dan tugas tersebut merupakan tugas kepala sekolah dengan membuat suatu kebijakan yang dapat mendukung kualitas sekolah.

Kepala sekolah perlu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua warga sekolah. Apalagi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang mana sekolah merupakan ciri sekolah *full day* yang proses kegiatan pembelajarannya mengharuskan sekolah merancang perencanaan pembelajaran dari pagi hingga sore yang berarti hampir seluruh aktifitas anak berada di sekolah, mulai dari belajar, makan, bermain dan ibadah yang dikemas dalam sistem pendidikan.

Sebagaimana dilihat dari observasi penulis di lapangan bahwa kepemimpinan kepala sekolah di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga, mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut menggunakan (8 SNP) atau delapan Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar isi, Standar kompetensi lulusan, Standar pendidik, Standar pendidik dan tenaga

kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan dengan kepala sekolah Ibu Samsia tentang mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari beliau mengatakan bahwa:

Untuk meningkatkan standar isi saya melakukan pendalaman materi pembelajaran guna mencapai standar kompetensi yang saya tuangkan dalam kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran mana di sekolah RA Aisyiyah Nurhaq Baruga telah mempunyai silabus, RPPM dan RPPH menunjang proses pembelajaran agar berjalan sesuai tujuan. Mengenai Standar pendidik adalah dengan memberikan motivasi dan dukungan agar pendidik dapat profesional dan memiliki kinerja yang baik dalam mendidik peserta didik sehingga menghasilkan lulusan-lulusan terbaik. Untuk meningkatkan mutu melalui standar tenaga kependidikan adalah dengan membuat suatu peraturan di mana para guru di sekolah ini diharuskan untuk melakukan tugasnya dengan cara yang profesional. Mengenai Standar sarana dan prasarana di sekolah ini adalah baik dan sudah cukup memadai walaupun masih ada beberapa sarana prasarana yang masih terbatas namun tidak menghambat kegiatan siswa, masih dalam tahap perbaikan sarana dan prasana yang kurang (Hasil Wawancara, 29 Februari 2020).

Selanjutnya, di waktu yang lain, Ibu Samsia melanjutkan sebagaimana hasil wawancara dengan peneliti bahwa:

Untuk Standar pengelolaan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga adalah saya kepala sekolah telah melakukan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan kegiatan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan dengan membuat suatu kebijakan atau program yang meningkatkan mutu pendidikan yang salah satunya adalah dengan program *full day school*. Standar penilaian di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga kepala sekolah yang guna melihat kinerja profesional guru adalah dengan melakukan suatu supervisi yang sesuai dengan

mekanisme, dan prosedur evaluasi (Hasil Wawancara, 02 Maret 2020).

Sejalan dengan pendapat tersebut, wawancara peneliti dengan Guru Kelas Risnawati bahwa:

Mutu pendidikan sekolah ini adalah dengan menggunakan 8 SNP di mana merupakan tugas kepala sekolah dan seluruh komponen sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini walau memiliki sedikit masalah yaitu mengenai sarana dan prasarana yang kurang yaitu tidak adanya perpustakaan sekolah, dan musholah serta guru yang perlu bimbingan dalam mengajar maka dari yang saya lihat kepala sekolah selalu membimbing dan memotivasi mereka dengan lebih baik (Hasil Wawancara, 02 Maret 2020).

Kemudian, pernyataan dari Guru Kelas Ibu Raminatin berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa:

Mutu pendidikan sekolah ini ada 8 standar pendidikan. Tugas kepala sekolah dan seluruh komponen sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini sebagaimana saya ketahui walau sarana dan prasarana yang terbatas tidak membuat para siswa merasa tidak nyaman sehingga pembelajaran berjalan dengan baik (Hasil Wawancara, 07 Maret 2020).

Selanjutnya pendapat yang sama juga ditegaskan oleh Guru Kelas Ibu Fitriani berdasarkan wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa:

Mutu pendidikan sekolah ini sudah sesuai dengan standar pendidikan sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar (Hasil Wawancara, 07 Maret 2020).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut di atas, mutu pendidikan RA Aisyiyah Nurhaq Baruga telah menerapkan (8 SNP) delapan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah yang telah dibuat yang mana Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar isi, Standar kompetensi lulusan, Standar pendidik, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian yang merupakan tugas kepala sekolah dan seluruh *stakeholder* untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut walau sarana dan prasarana pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari masih terbatas yaitu tidak adanya perpustakaan sekolah, dan musholah serta yang lainnya tidak membuat para siswa merasa tidak nyaman sehingga pembelajaran berjalan dengan baik serta guru yang kurang profesional dalam mengajar maka kepala sekolah selalu membimbing dan memotivasi mereka dengan lebih baik.

4.1.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq

4.1.3.1 Faktor Pendukung Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq

Pada sub ini, peneliti akan mengungkapkan faktor pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari seperti yang dijelaskan oleh kepala sekolah Ibu Samsia saat wawancara dengan peneliti.

Beliau menjelaskan bahwa:

Ada beberapa faktor yang cukup mendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini, antara lain, tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini rata-rata lulusan S-1, RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari merupakan sekolah yang diinginkan oleh

masyarakat, dan memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari halaman yang cukup luas (Hasil Wawancara, 29 Februari 2020).

Guru kelas juga memberikan jawaban yang sama terkait faktor pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Sandrayani bahwa:

Salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini adalah, sekolah ini adalah sekolah yang diinginkan oleh banyak masyarakat, selain itu faktor lain adalah guru-guru di sekolah ini rata-rata Sarjana dan memiliki kepribadian yang baik dalam mendidik murid. Ditambah juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari halaman bermain cukup luas (Hasil Wawancara, 11 Maret 2020).

Guru Pendamping Ibu Jaemula juga memberikan jawaban yang sama terkait faktor pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari beliau menjelaskan bahwa:

Ada beberapa faktor pendukung di lembaga ini, RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari adalah guru-guru di sekolah ini semuanya berpendidikan S-1, sekolah ini adalah sekolah yang diminati oleh banyak masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai (Hasil Wawancara, 11 Maret 2020).

Sejalan dengan jawaban pernyataan di atas, juga diperkuat oleh penjelasan dari guru kelas Ibu Hamsinang bahwa:

Faktor yang cukup mendukung di sekolah ini, seperti guru-guru sudah sarjana, *Alhamdulillah* sarana dan prasarana yang cukup mendukung dari lapangan yang cukup luas dan lebar, juga ditambah lagi adanya kekompakan antara guru dalam mendukung segala

kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah yaitu kepala sekolah (Hasil Wawancara, 11 Maret 2020).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari ini, di antaranya: (1) RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari memiliki guru semuanya berpendidikan S-1 sehingga sesuai dengan kualifikasi guru. (2) Memiliki sarana dan prasana yang cukup mendukung dari lapangan yang cukup luas dan lebar, dan (3) adanya kekompakan antara guru dalam mendukung segala kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah yaitu kepala sekolah.

4.1.3.2 Faktor Penghambat Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq

Pada sub ini peneliti akan mengungkap faktor penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari seperti yang dijelaskan oleh kepala sekolah saat wawancara dengan peneliti. Beliau menjelaskan bahwa:

Adapun yang menjadi kendala untuk menerapkan kebijakan saya dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini adalah masih ada tenaga pendidik di sekolah ini masih jauh dari harapan dan harus terus dibimbing. Kendala lainnya adalah masalah pendanaan yang masih dirasa minim (Hasil Wawancara, 29 Februari 2020).

Pernyataan Guru kelas Ibu Raminatin juga memberikan jawaban yang sama terkait faktor penghambat dalam

meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga

Kendari:

Tidak ada sekolah yang tidak memiliki hambatan dari segala hal apalagi dalam hal peningkatan mutu pendidikan semua tidak terlepas dari segi pendanaan yang minim juga ditambah SDM yang lemah (Hasil Wawancara, 07 Maret 2020).

Pernyataan di atas diperkuat oleh penjelasan dari Ibu Risnawati selaku guru kelas mengenai faktor penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga

Kendari:

Kalau berbicara faktor penghambat memanglah tidak terlepas dari masalah pendanaan yang kurang untuk pemenuhan sarana dan prasarana sekolah (Hasil Wawancara, 02 Maret 2020).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sandrayani selaku guru kelas yang diwawancarai oleh peneliti terkait faktor penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari:

Faktor penghambat tidak lain dari mengenai pendanaan yang ada maka akibatnya masih ada beberapa program atau kebijakan yang belum terealisasikan dengan baik (Hasil Wawancara, 11 Maret 2020).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut diketahui hampir semua warga sekolah mengakui bahwa faktor pengambat dari terlaksananya efektivitas kegiatan pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari adalah minimnya pendanaan yang tersedia sehingga kebutuhan yang menunjang lembaga

belum semuanya terpenuhi, masih ada guru yang melaksanakan tugasnya tidak sesuai tugas fungsionalnya. Seharusnya seluruh elemen dan birokrasi pendidikan harus senantiasa memperhatikan kekurangan dalam mewujudkan program-program yang telah dirancang. Selain itu, guru tersebut perlu mendapatkan bimbingan dan pelatihan yang berhubungan tugas keprofesionalan guru.

4.1.4 Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan RA Aisyiyah Nurhaq

Kepala sekolah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, membina tenaga kependidikan, dan mendayagunakan sekaligus memelihara sarana dan prasarana. Melihat peranan kepala sekolah tersebut, kepala sekolah mempunyai tantangan untuk dapat menjalankan pendidikan di sekolah agar terarah, berencana dan berkesinambungan dengan menetapkan kebijakan dan memberikan ide yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah sehingga sekolah dapat bekerja maksimal sesuai dengan program yang telah ditentukan. Dan harus menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua warga sekolah. Apalagi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang mana sekolah merupakan ciri sekolah *full day* di mana proses kegiatan pembelajarannya mengharuskan

sekolah merancang perencanaan pembelajaran dari pagi hingga sore yang berarti hampir seluruh aktivitas anak berada di sekolah, mulai dari belajar, makan, bermain dan ibadah yang dikemas dalam sistem pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari Ibu Hamsinang, menjelaskan bahwa:

Untuk peningkatan mutu di sekolah ini, kepala sekolah selalu menupervisi supaya guru-guru mengajar sesuai target pembelajaran. Kepala sekolah sangat mengapresiasi dengan semua kegiatan pengembangan yang sifatnya baik untuk guru. Jadi hampir semua kegiatan yang kami usulkan itu selalu disetujui (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Hal tersebut juga dikatakan oleh Guru Kelas Ibu Risnawati, beliau mengatakan peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari bahwa,

Secara umum kepala sekolah adalah penanggungjawab bahwa setiap apapun kegiatan pasti diketahui kepala sekolah artinya saya melihat lebih pada pengawasan ada bimbingan. Dari sisi pengawasan kepala sekolah ini terkadang memberikan rambu-rambu mana kegiatan yang boleh dilakukan mana yang tidak, dari sisi bimbingan kepala sekolah selalu mengawal proses kegiatan ini supaya terus berjalan dan sesuai dengan tujuan. Tugas supervisi dari sekolah ini sampai sekarang berjalan sangat baik karena kepala sekolah selalu terlibat apapun kegiatan yang dilakukan oleh sekolah (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Sejalan dengan pernyataan di atas, yang diwawancarai peneliti guru pendamping Ibu Jaemula juga memberikan jawaban yang sama tentang kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari.

Kebijakan kepala sekolah sangat besar dalam memutuskan apakah ini layak atau tidak untuk dilaksanakan di sekolah ini, beliau yang menentukan tapi tentu hasil dari musyawarah bersama tidak kemudian memutuskan secara sepihak itu semua dari keputusan bersama di situlah letak peran penting dari kepala sekolah untuk memutuskan sebuah kebijakan lantas kemudian kami yang mengatur bagaimana berjalannya kebijakan tersebut. Selain itu pemimpin sekolah juga mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pelaksanaan atau proses pembelajaran (Hasil Wawancara, 11 Maret 2020).

Selanjutnya pendapat dari Guru Kelas Ibu Fitriani berdasarkan dari wawancara dengan peneliti bahwa,

Kepala sekolah menyampaikan idenya memutuskan apakah kegiatan yang diadakan layak atau tidak untuk dilaksanakan di sekolah ini, beliau yang menentukan tapi tentu hasil dari musyawarah bersama. Kemudian kami yang mengatur bagaimana berjalannya kebijakan tersebut (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga memutuskan apakah ini layak atau tidak untuk dilaksanakan di sekolah ini, beliau yang menentukan tapi tentu hasil dari musyawarah bersama guru, tidak memutuskan secara sepihak.

Kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam hal penerapan program yang dibuat oleh kepala sekolah Ibu Samsia, beliau mengatakan bahwa:

Di sini saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru yang bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan agar siswa dan seluruh komponen sekolah berjalan sesuai dengan tujuan hal yang pertama. Saya buat adalah membuat suatu kebijakan berupa sistem *full day school*, bimbingan ibadah dan eksrakurukuler dimana sebelum di laksanakan disosialisasikan

dulu dengan guru-guru dan meminta pendapat mereka (Hasil Wawancara, 29 Februari 2020).

Guru Kelas Risnawati, menjelaskan tentang kebijakan yang di buat untuk meningkatkan mutu pendidikan, beliau mengatakan bahwa:

Saat ini dari yang dilihat kebijakan atau program yang telah di buat oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu adanya sistem *full day school*, pembinaan ibadah dan ekstrakurikuler di mana sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut, disosialisasikan dulu dengan guru-guru (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Sejalan dengan jawaban kepala sekolah dan guru kelas, yang di wawancarai peneliti juga memberikan jawaban yang sama tentang kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan mutu pendidikan, Guru Kelas Ibu Raminatin, beliau mengatakan bahwa:

Kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah adalah suatu program yaitu adanya *full day school*, adanya ekstrakurikuler. Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, terlebih dahulu kepala sekolah membuat suatu sosialisasi dulu dengan guru-guru dan meminta pendapat guru-guru (Hasil Wawancara, 11 Maret 2020).

Guru pendamping Ibu Jaemula juga memberikan penjelasan yang sama tentang kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, beliau mengatakan bahwa:

Untuk meningkatkan mutu pendidikan oleh kepala sekolah kebijakan yang bertama beliau buat adalah membuat program *fullday school*, kegiatan ekstrakurikuler berupa bimbingan bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Sebelum kegiatan itu dijalankan, kepala sekolah mensosialisasikan dulu kepada guru-guru (Hasil Wawancara, 11 Maret 2020).

Kemudian guru Sandrayani memberikan penjelasan yang sama tentang kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan beliau mengatakan bahwa:

Kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini yaitu membuat program *full day school*, kegiatan ekstrakurikuler Bahasa Inggris dan Arab (Hasil Wawancara, 11 Maret 2020).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga adalah membuat program *full day school*, bimbingan ibadah dan kegiatan ekstrakurikuler berupa bimbingan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Kepala sekolah membuat suatu kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kepala sekolah menggunakan kepemimpinan demokrasi dan juga situasional melibatkan semua guru untuk saling bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari Ibu Samsia, menjelaskan tentang upaya kepala sekolah dalam menerapkan program yang telah dibuat oleh kepala sekolah yaitu, sistem *full day school*, pembinaan ibadah, dan ekstrakurikuler. Beliau mengatakan bahwa:

Mengenai program tentang sistem *full day school* penerapannya adalah dengan membuat inovasi-inovasi yang baru agar orang tua dan peserta didik yang ingin masuk ke sekolah ini terasa nyaman inovasi tersebut ialah saya menyediakan sarana berupa AC dan kipas angin di dalam kelas. Adanya sistem *full day school* ini lamanya waktu pembelajaran tidak akan menjadi beban, karena sebagian

waktunya digunakan untuk bermain. Adapun pembinaan ibadah yang dilaksanakan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari yaitu, sholat berjamaah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah (sholat Dhuha), dan mengenai penerapan program ekstrakurikuler di sini berupa bimbingan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang masing-masing diprogramkan 2 kali kegiatan dalam satu pekan (Hasil Wawancara, 29 Februari 2020).

Guru Kelas Risnawati, menjelaskan tentang upaya kepala sekolah dalam menerapkan program yang telah dibuat oleh kepala sekolah yaitu, sistem *full day school*, bimbingan ibadah dan ekstrakurikuler.

Beliau mengatakan bahwa:

Mengenai program tentang sistem *full day school* penerapannya adalah dengan membuat kegiatan yang menarik agar orang tua dan peserta didik yang ingin masuk ke sekolah ini terasa nyaman inovasi tersebut ialah saya menyediakan sarana berupa AC dan kipas angin di dalam kelas. Penerapan program ekstrakurikuler di sini berupa bimbingan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab setiap dua kali pertemuan setiap pekan (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Sejalan dengan jawaban kepala sekolah dan guru kelas, yang di wawancarai peneliti guru kelas B, Ibu Sandrayani juga memberikan jawaban yang sama tentang upaya kepala sekolah dalam menerapkan program yang telah dibuat oleh kepala sekolah yaitu sistem *full day school*, bimbingan ibadah dan ekstrakurikuler. Beliau mengatakan bahwa:

Program tentang *full day school* ini, siswa merasa nyaman dengan program ini karena di kelas disediakan AC dan kipas angin agar siswa tidak merasa gerah. Untuk pembinaan ibadah *alhamdulillah* kami guru-guru dan juga kepala sekolah membiasakan melatih kesadaran para siswa untuk melakukan hal-hal yang baik yaitu bernilai ibadah seperti melakukan shalat wajib berjamaah dan begitu juga dengan shalat shalat

sunnah. Mengenai penerapan program ekstrakurikuler di sini diberikan bimbingan Bahasa Arab dan Inggris (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, sebelum kepala sekolah membuat kebijakan atau program kepala sekolah melakukan komunikasi terbuka dalam pengambilan keputusan dilakukan baik secara formal maupun informal dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sarana dan prasaran, SDM, pendidik dan tenaga kependidikan. Mulai dengan rapat kerja guru dan pertemuan biasa, yang mana program tersebut adalah sistem *full day school*, bimbingan ibadah dan ekstrakurikuler. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga menjalankan sesuai dengan visi dan misi yang di buat dan sesuai dengan program yang dijalankan kepala sekolah merupakan kepala sekolah yang baik dalam gaya kepemimpinannya yaitu selalu terbuka antara sesama dan demokratis.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan kepala sekolah RA Aisyiyah Nurhaq adalah:

4.1.4.1 Komunikasi

Sebelum mengambil suatu keputusan, kepala sekolah RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yaitu membuat suatu kebijakan kepala sekolah. Hal yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu melakukan komunikasi terbuka dalam pengambilan keputusan dilakukan baik secara formal maupun informal. Untuk rapat

secara formal dilakukan dengan Rapat Kerja, Rapat Wali Kelas, Rapat Guru dan Karyawan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari Ibu Samsia, menjelaskan tentang kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan mutu pendidikan beliau mengatakan bahwa:

Dalam membuat sebuah kebijakan atau keputusan saya biasanya mengadakan rapat guna bertukar pendapat. Dalam mengambil keputusan pun saya tidak serta merta sepihak, walaupun sudah mempunyai program, tapi sebelum konsep itu digulirkan, saya tawarkan terlebih dahulu kepada guru dan orangtua siswa. Jika sudah sepakat baru dirumuskan. Program itu dibahas lewat rapat dengan guru kelas, rapat dengan guru karyawan, serta rapat dengan orang tua murid (Hasil Wawancara, 29 Februari 2020).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Guru Kelas Risnawati berdasarkan dari wawancara dengan peneliti. Beliau menjelaskan tentang kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan mutu pendidikan, beliau mengatakan bahwa:

Menurut saya, kepala sekolah dapat menyelesaikan masalah di sekolah ini dengan baik sehingga semua pihak merasa dihargai dalam berpendapat yaitu dalam mengambil sebuah kebijakan apapun senantiasa dirapatkan dengan melalui rapat guru dan orangtua murid (Hasil Wawancara, 02 Maret 2020).

Sejalan dengan jawaban kepala sekolah dan guru kelas di atas, yang diwawancarai peneliti juga memberikan jawaban yang sama tentang kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan

mutu pendidikan, Guru Kelas Ibu Raminatin juga mengatakan bahwa:

Mengenai kepala sekolah, beliau dalam membuat suatu kebijakan atau menetapkan suatu program yang harus dijalankan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan beliau senantiasa menerima saran dan masukan dari siapa pun terhadap masalah apapun. Setiap kebijakan yang beliau buat senantiasa dirapatkan dulu dengan melalui melalui rapat (Hasil Wawancara, 07 Maret 2020).

Selanjutnya pendapat dari Guru Kelas Ibu Fitriani, hasil wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa:

Kepala sekolah dalam membuat suatu kebijakan suatu program yang harus dijalankan, beliau menerima saran dan masukan dari guru dan selalu menyelesaikan setiap masalah melalui melalui rapat guru-guru yang dilakukan beberapa kali dalam satu semester (Hasil Wawancara, 07 Maret 2020).

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, kepala sekolah RA Aisyiyah Nurhaq Baruga dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dalam mengambil keputusan, kepala sekolah melibatkan semua warga sekolah untuk saling bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Melalui Komunikasi yaitu rapat-rapat yang dilakukan oleh sekolah untuk menanamkan kebiasaan atau membiasakan dalam setiap mengambil keputusan dilakukan dengan rapat atau musyawarah, komunikasi tersebut tidak hanya dilakukan dalam suasana formal namun juga dalam suasana informal.

4.1.4.2 Rekrutmen Peserta Didik

Ketersediaan sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kebijakan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari adalah sebagai yaitu siswa. Siswa di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari pada tahun ajaran 2019/2020 berjumlah 78 siswa yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas A dan B. Kelas A hanya satu rombongan belajar, sedangkan kelas B terbagi menjadi tiga rombongan belajar (rombel), yaitu kelas B-1, B-2, dan B-3.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Samsia selaku Kepala RA Aisyiyah Nurhaq Baruga dalam hal rekrutmen peserta didik bahwa:

Di sekolah ini, kami merekrut peserta didik di awal tahun pelajaran. Penerimaan peserta didik baru diterima oleh panitia yang sudah dibentuk (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Raminatin berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti bahwa:

Dalam menerima murid baru di sekolah ini diterima oleh panitia yang sudah dibentuk oleh kepala sekolah bersama guru-guru (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Kedua pernyataan di atas, juga dipertegas oleh Ibu Risnawati dari hasil wawancara dengan peneliti bahwa:

Perekrutan murid-murid baru dilaksanakan di awal tahun ajaran baru. Penerimaan murid baru ini dilakukan oleh panitia yang sudah dibentuk sebelumnya oleh kepala sekolah dan guru-guru (Hasil Wawancara, 07 Maret 2020).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah mengeluarkan kebijakan dalam hal perekrutan peserta didik baru di RA Aisyiyah Nurhaq dengan cara membentuk panitia penerimaan murid baru. Kegiatan tersebut dilaksanakan di awal tahun ajaran baru.

4.1.4.3 Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Untuk meningkatkan kualitas pendidik maupun tenaga kependidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari, sekolah melakukan berbagai pembimbingan yang dilakukan sendiri oleh kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari Ibu Samsia, menjelaskan bahwa:

Banyak hal yang dilakukan dan para guru-guru sekolah seperti yang belum lama ini mengadakan kegiatan bimbingan. Kegiatan bimbingan berupa bimbingan penyusunan perangkat pembelajaran (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Guru Kelas Risnawati, menjelaskan tentang kebijakan yang di buat untuk meningkatkan mutu pendidikan, beliau mengatakan bahwa:

Ada semacam pembimbingan untuk guru tertentu misalnya pembuatan perangkat pembelajaran. Untuk guru-gurunya nanti kalau misalnya ada pembuatan RPPM, RPPH, dan sebagainya. Jadi, ada semacam pembimbingan yang mendukung tugas guru (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Sejalan dengan jawaban kepala sekolah dan guru di atas, yang diwawancarai peneliti juga memberikan jawaban yang sama tentang kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan mutu pendidikan, Guru Kelas Ibu Raminatin, beliau mengatakan bahwa:

Seperti yang diketahui, kepala sekolah mengadakan bimbingan penyusunan perangkat pembelajaran. Kalau yang dilakukan persemester seperti rapat-rapat untuk meningkatkan kualitas guru (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Selanjutnya pendapat dari Guru Kelas Ibu Fitriani beliau mengatakan bahwa:

Kepala sekolah bimbingan penyusunan perangkat pembelajaran untuk guru. Jadi ada semacam pendampingan yang mendukung tugas masing-masing guru ada tersendiri (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, RA Aisyiyah Nurhaq Baruga memiliki sumber daya manusia (tenaga pendidik dan kependidikan) yang mayoritas yang baik kepala sekolah dan para guru dalam meningkatkan SDM tenaga pendidik dan kependidikan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang senantiasa dilakukan melalui beberapa program kegiatan yang dilakukan secara rutin yaitu pembimbingan maupun bersifat insidental menyesuaikan kebutuhan. Kegiatan pembimbingan adalah berupa bimbingan pembuatan perangkat pembelajaran yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.

4.1.4.4 Keuangan dan Pembiayaan

Pelaksanaan kebijakan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari didukung alokasi dana yang berasal dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudhatul Athfal dari Kementerian Agama, iuran bulanan siswa (bagi siswa yang mampu) dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari Ibu Samsia, menjelaskan bahwa:

Kalau pembiayaan di sekolah ini sama dengan sekolah yang lain, yaitu ada dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudhatul Athfal yang berasal dari Kementerian Agama. Selain itu juga ada sumbangan dari orang tua siswa. Sebelum menggunakan anggaran tersebut, kami membuat rencana penggunaan anggaran mengenai item apa saja yang akan diadakan untuk dibiayai. Penggunaan anggaran ini kemudian disampaikan kepada guru-guru (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Guru Kelas Risnawati, menjelaskan tentang kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu sumber daya keuangan, beliau mengatakan bahwa:

Sumber pembiayaan sekolah ini dari BOP dan iuran bulanan dari orang tua siswa. Bagi siswa yang tidak mampu, dibebaskan dari segala iuran. Sebelum menggunakan anggaran itu biasanya kepala sekolah membahas rencana penggunaan anggaran untuk membiayai apa saja kebutuhan sekolah (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Sejalan dengan jawaban kepala sekolah dan guru kelas di atas, yang diwawancarai peneliti juga memberikan jawaban

yang sama tentang kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam sumber daya keuangan, Guru Kelas Ibu Raminatin, beliau mengatakan bahwa:

Sebagian dibiayai oleh BOP, sebagian lagi dari iuran bulanan siswa (Komite dan bantuan lain yang tidak mengikat). Biaya tersebut digunakan sesuai dengan rencana penggunaan anggaran yang telah disusun sebelumnya untuk kebutuhan sekolah (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu sekolah di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga telah didukung oleh anggaran dari berbagai sumber. Adapun sumber pembiayaan adalah dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudhatul Athfal dari Kementerian Agama, iuran bulanan murid (bagi yang mampu) dan dari sumber lain yang tidak mengikat. Penggunaan anggaran ini berdasarkan rencana penggunaan anggaran yang telah disusun sebelumnya oleh kepala sekolah bersama guru tentang kebutuhan apa saja yang perlu dibiayai di sekolah.

4.1.4.5 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana sekolah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan sekolah dalam upaya peningkatan mutu sekolah. Sarana prasarana digunakan untuk media pembelajaran dan mempermudah pelaksanaan kegiatan atau proses pembelajaran. Keadaan sarana prasarana yang ada di

RA Aisyiyah Nurhaq Baruga sudah cukup memadai walaupun masih ada beberapa sarana prasarana yang masih terbatas namun tidak menghambat kegiatan siswa. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Samsia berdasarkan wawancara dengan peneliti bahwa:

Saat ini sudah cukup memadai walau masih dalam tahap penyediaan sarana dan pembanguna prasarana sekolah namun tidak menghambat kegiatan belajar murid (Hasil Wawancara, 11 Maret 2020).

Hal tersebut juga dikatakan oleh Guru Kelas Risnawati, beliau mengatakan bahwa:

Kelasnya sudah nyaman karena sarana pembelajaran, media pembelajaran dan alat permainan edukatif (APE) sudah tersedia (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Hal yang sama juga diperkuat dengan pernyataan Guru Kelas Ibu Jaemula, beliau mengatakan bahwa:

Di sini seluruh kebutuhan dalam hal pembelajaran telah terpenuhi seperti jika panas maka AC dan kipas angin telah disediakan oleh pihak sekolah sehingga murid-murid merasakan nyaman dalam belajar (Hasil Wawancara, 11 Maret 2020).

Selanjutnya pendapat dari Guru Kelas Ibu Fitriani dari hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa :

Seluruh kebutuhan dalam hal pembelajaran telah terpenuhi seperti jika panas, maka AC dan kipas angin telah disediakan oleh pihak sekolah sehingga murid merasakan nyaman belajar di kelas (Hasil Wawancara, 09 Maret 2020).

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan parasaran di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga dalam hal membantu proses pembelajaran di kelas yang nyaman

disediakan AC dan kipas angin. Tujuannya agar murid-murid merasa nyaman ketika belajar di kelas.

Berdasarkan dari uraian di atas, kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga adanya sumber daya manusia (SDM) yaitu adanya siswa, Pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya keuangan dan sumber daya sarana dan prasana agar dapat mencapai suatu tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

Berkenaan dengan sifat atau karakter yang dimiliki oleh implementor dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Peran pemimpin dalam sebuah pelaksanaan kebijakan menjadi salah satu hal yang perlu untuk di perhatikan karena pemimpin sebagai penggerak suatu sekolah sebagai pemimpin dalam lembaga tersebut memiliki sifat demokratis yaitu terbuka dan dalam mengambil sebuah keputusan saling memberi dan menerima setiap pendapat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Proses Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu di RA Aisyiyah Nurhaq

Berdasarkan dari hasil temuan penelitian di atas, proses kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga dengan membuat suatu perencanaan/perumusan program kemudian berkerjasama dengan seluruh *stakeholder* yang ada di sekolah tersebut menjalankan dan yang terakhir adalah melakukan

evaluasi terhadap program yang dibuat sesuai dengan tujuan melalui hasil musyawarah (rapat) yaitu dengan membuat program *full day school*, bimbingan ibadah dan kegiatan ekstrakurikuler.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Rusdiana (2015, h. 47-48), menyatakan bahwa:

Dalam suatu kebijakan pendidikan terdapat tiga tahap kebijakan yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi. kepala sekolah sebagai petugas yang profesional dituntut untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi dari kebijakan pendidikan yang telah dibuat tersebut.

Pada tataran implementasi, suatu kebijakan ada yang bersifat *self-excuting*, yakni kebijakan tersebut akan dengan sendirinya terimplementasikan, dan ada juga yang bersifat non *self-excuting*, yaitu suatu kebijakan negara yang pengimplementasiannya perlu diusahakan oleh *stakeholders* (Wahab, 2002, h. 61). Menurut Islamy (2001, h.76), hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat *self-excuting*, justru yang lebih banyak adalah yang bersifat *non self-excuting*. Kebijakan program sekolah adalah merupakan kebijakan yang bersifat *non self-excuting*, dalam pengertian bahwa kebijakan tersebut tidak dapat secara otomatis diberlakukan setelah kebijakan itu dibuat, akan tetapi masih memerlukan waktu untuk adaptasi, bahkan penyesuaian-penyesuaian ketika diimplementasikan.

Selain itu, implementasi adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan, atau dengan kata lain penerapan perencanaan ke dalam praktek. Namun dalam hal ini tidak semua program yang

diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Gejala ini menurut Wahab (2002, h. 61), dinamakan sebagai *implementation gap*, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses implementasi kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).

Manajemen peningkatan mutu Sekolah merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan. Sistemnya adalah menawarkan sekolah atau Sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Manajemen peningkatan mutu Sekolah pada hakikatnya adalah suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan jalan pemberian kewenangan dan tanggung jawab pengambilan keputusan kepala sekolah dengan melibatkan partisipasi individual, baik personal sekolah maupun anggota masyarakat (Mutahar, 2013, h. 123-124).

Uraian tersebut sesuai dengan pandangan Zulkifli (2015, h. 179) bahwa mutu pendidikan pada satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan memberikan hanya yang terbaik. Dalam implementasinya, kegiatan penjaminan mutu dilakukan secara sinergis oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Penjaminan mutu yang bersifat eksternal dilakukan oleh berbagai pihak atau instansi di luar satuan pendidikan yang secara formal memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi satuan

pendidikan dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Secara internal satuan pendidikan menerapkan penjaminan mutu manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS/M), visi dan misi, menyusun program kerja, dan melakukan ujian sekolah/madrasah serta evaluasi diri secara menyeluruh. Upaya satuan pendidikan dalam peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan sebagai penjaminan mutu yang bersifat internal.

4.2.2 Mutu Pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq

Sekolah RA Aisyiyah Nurhaq Baruga telah menerapkan (8 SNP) delapan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah dibuat yang mana Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar isi, Standart kompetensi lulusan, Standar pendidik, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian. Penerapan 8 standar tersebut merupakan tugas kepala sekolah dan seluruh *stekholder* untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut walaupun sarana dan prasarana pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari masih kurang yaitu tidak adanya perpustakaan sekolah, dan musholah serta yang lainnya tidak membuat para murid merasa tidak nyaman sehingga pembelajaran berjalan dengan baik serta guru yang kurang profesional dalam mengajar maka kepala sekolah selalu membimbing dan memotivasi mereka dengan lebih baik dan membuat

suatu kebijakan atau program di sekolah berupa program *full day School*, bimbingan ibadah dan program Ekstrakurikuler.

Ketiga program tersebut jika dikaitkan dengan Standar Nasional Pendidikan PAUD, maka masuk dalam Standar Pengelolaan, di mana dalam standar ini tercantum dalam item Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana Kerja Tahunan yang termuat dalam Standar Pengelolaan adalah berisi tentang: (1) peserta didik, (2) kurikulum dan pembelajaran, (3) pendidik dan tenaga kependidikan, (4) sarana dan prasarana, (5) pendanaan, dan (6) peran serta masyarakat (lampiran 6).

Hal ini berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh Tim Asesor BAN PAUD-PNF Provinsi Sulawesi Tenggara di RA Aisyiyah Nurhaq pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, RA Aisyiyah Nurhaq terakreditasi B (Baik). Penjelasan Hasil Akreditasi RA Aisyiyah Nurhaq untuk masing-masing standar adalah sebagai berikut: 1) Standar Kompetensi Lulusan dengan nilai capaian 34 (77%), 2) Standar Isi dengan nilai capaian 129 (87%), 3) Standar Proses dengan nilai capaian 110 (92%), 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan nilai capaian 48 (86%), 5) Standar Sarana dan Prasarana memiliki nilai capaian 90 (90%), 6) Standar Pengelolaan mendapatkan nilai capaian 164 (75%), 7) Standar Pembiayaan dengan nilai capaian 40 (77%), dan 8) Standar Penilaian Pendidikan mendapatkan nilai capaian 32 (73%). Total Nilai keseluruhan dari 8 Standar adalah 647, berada pada peringkat nilai B (Baik) (lampiran 6).

Berdasarkan penilaian 8 Standar Nasional Pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga dapat dipahami bahwa mutu di sekolah tersebut sudah baik. Proses selanjutnya adalah memperbaiki dan membenahi beberapa standar yang perlu dimaksimalkan terutama Standar Pengelolaan dan Standar Penilaian Pendidikan. Hal inilah yang perlu menjadi tugas Kepala Sekolah, Guru dan Staf untuk membenahinya agar ke depan dapat mencapai nilai yang maksimal.

Hal ini senada dengan pernyataan Zulkifli (2015, h. 184) dalam penelitiannya bahwa proses pencapaian mutu satuan pendidikan adalah melalui pemenuhan SNP yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pencapaian mutu secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program secara terus-menerus dan berkelanjutan merupakan upaya penjaminan mutu satuan pendidikan yang bersangkutan.

Sesuai dengan pernyataan PP No.19 Tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar pendidikan yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar nasional bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP 19/2005 Pasal 4). Oleh karena itu kualitas dan penjaminan kualitas

dapat dipandang sebagai suatu inovasi dalam suatu pendidikan (Depdiknas No. 19 Tahun 2005).

Sehubungan dengan hal tersebut, Nurdin (2005, h. 79) menyatakan, bahwa ada beberapa indikator pendidikan yang bermutu, antara lain:

- 1) Hasil akhir pendidikan merupakan tujuan pendidikan. Dari hasil tersebut diharapkan para lulusan dapat memenuhi tuntutan masyarakat bila ia bekerja atau melanjutkan studi ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Hasil langsung pendidikan; berupa; (1) pengetahuan, (2) sikap dan (3) ketrampilan. Hasil inilah yang sering digunakan sebagai kriteria keberhasilan pendidikan.
- 3) Proses pendidikan; merupakan interaksi antara *raw input*, *instrumental input*, dan lingkungan, untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada proses ini, tidak berbicara mengenai wujud gedung sekolah dan alat-alat pelajaran, akan tetapi bagaimana mempergunakan gedung dan fasilitas lainnya agar siswa dapat belajar dengan baik.
- 4) Instrumenal input; terdiri dari tujuan pendidikan, kurikulum, fasilitas dan media pendidikan, sistem administrasi pendidikan, guru, sistem penyampaian, evaluasi, serta bimbingan dan penyuluhan. Instrumental input tersebut harus dapat berinteraksi *dengan raw input* (siswa) dalam proses pendidikan.
- 5) *Raw input* dan lingkungan juga mempengaruhi kualitas mutu pendidikan.

Pernyataan Saleh yang dikutip oleh Yanto dan Fathurrochman bahwa,

“Dalam usaha menerapkan peningkatan mutu pendidikan nasional adalah melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen pendidikan. Ada beberapa komponen yang dapat meningkatkan mutu pendidikan, di antaranya adalah: (a) Proses pendidikan; Pikiran utama yang terdapat dalam prinsip, strategi, dan tahapan belajar mengajar mencerminkan bahwa pendidikan tidak sesederhana dengan proses penyampaiannya.

(b) Prosedur pendidikan, pengembangan kegiatan belajar mengajar harus diorientasikan pada fitrah manusia agar terwujud keseimbangan (Yanto dan Fathurrochman, h. 127).

Kondisi mutu di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2015, h. 119) di PAUD Fatimah, di mana dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa mutu pendidikan PAUD Fatimah mengalami peningkatan, antara lain karena keaktifan guru dalam mengikuti pelatihan maupun seminar ditingkat daerah bahkan provinsi. Hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan pula pendidikan di PAUD Fatimah. Bahkan hal tersebut langsung terwujud dengan peningkatan mutu pendidikan anak, dilihat dari hasil belajar para siswa, dengan adanya pencapaian terhadap kompetensi siswa PAUD Fatimah.

4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan yang ada untuk mendukung seluruh program dan kegiatan. Dukungan dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga adalah Tenaga Pendidik sudah bergelar Sarjana. Dalam pelaksanaan kebijakan sekolah, sekolah membutuhkan agen pelaksana dalam hal ini tenaga pendidik dan pendidik untuk melaksanakan kebijakan yang ada dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing agen pelaksana. Dengan

tingkat pendidikan yang semuanya bergelar sarjana memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada di sekolah.

Suatu pelaksanaan kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Rohman (2009, h. 147) menyatakan, bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.
- 2) Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan.
- 3) Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-

masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

Adanya dukungan dari pihak yayasan dan pihak eksternal lainnya, RA Aisyiyah Nurhaq Baruga merupakan sekolah yang dibimbing langsung oleh bapak Ibu Marlina Gazali selaku ketua Yayasan selain itu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dukung dari internal sekolah dan eksternal sekolah memberikan dampak positif terhadap implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga. Kemudian dari orangtua peserta didik sendiri kepala sekolah berusaha bekerja sama yang baik dengan wali murid. Misalnya saat ada program yang ingin dilakukan oleh pihak sekolah, orangtua dihubungi terkait dengan program yang akan dilaksanakan dan saling bekerjasama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardin dan Bardawan (2018, h. 122) di SMK S Attaufiq, SMK S Yadika dan Dharma Bhakti bahwa Ketiga SMK S di Jambi yang menjadi subyek penelitian ini selalu melaksanakan tugasnya dengan membentuk tim kerja. Terutama di SMK S Dharma Bhakti 4, mereka sangat mengutamakan kerja sama dan saling membantu. Semua pekerjaan diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu, kemudian berbagi tugas dan setiap bawahan sangat menghargai atasannya. Semua pekerjaan diberikan kepada masing-masing bagian yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, dalam hal meningkatkan mutu pendidikan diperlukan kerja sama antar elemen yang terlibat langsung maupun tidak langsung di sekolah. Peran semua elemen pendidikan mulai dari kepala sekolah, ketua yayasan, orang tua/wali murid, guru, staf dan pemerintah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sebagaimana juga di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga yang selalu didukung oleh warga sekolah untuk mengembangkan lembaga pendidikannya.

4.2.4 Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq

Kebijakan atau program pendidikan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari adalah membuat program *Full day School*, Bimbingan ibadah dan program Ekstrakurikuler guna meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya komunikasi dilakukan baik secara formal maupun informal, yaitu rapat secara formal dilakukan dengan guru-guru dan seluruh *stakeholder* yang ada di sekolah tersebut.

Sesuai dengan pernyataan, Sabatier & Mazmanian dalam Sudiyono (2007, h. 99-100), mengemukakan bahwa putusan kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal, yaitu:

- 1) Program harus mendasarkan diri pada sebuah kajian teori yang terkait dengan perubahan pelaku kelompok sasaran guna mencapai hasil yang telah ditetapkan. Kebanyakan pengambilan atau perumusan kebijakan didasarkan pada teori sebab akibat. Teori ini terdiri dua bagian, bagian pertama adanya keterkaitan antara

pencapaian dengan tolak ukur atau hasil yang diharapkan. Bagian kedua khusus mengenai cara pelaksanaan kebijakan yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran.

- 2) Undang-Undang atau peraturan tidak boleh ambigu atau bermakna ganda. Dalam hal ini pemerintah harus dapat mengkaji ulang produk-produk hukum. Sasaran kebijakan harus memiliki derajat ketepatan dan kejelasan, dimana keduanya berlaku secara internal maupun dalam keseluruhan program yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana.
- 3) Para pelaku kebijakan harus memiliki kemampuan manajerial, dan politis dan komitmen terhadap tujuannya yang akan dicapai. Para pemimpin dan perumus kebijakan dapat mengambil langkah baik pada ranah merencanakan sebuah peraturan maupun dalam pengangkatan personil baru nonlayanan masyarakat, guna meningkatkan isi dan keterdukungan pemimpin terhadap pencapaian tujuan Undang-Undang.
- 4) Program harus didukung oleh para pemangku kepentingan (pemilih, perumus undang-undang, pengadilan yang mendukung).
- 5) Prioritas umum dari sasaran perundang-undangan tidak signifikan direduksi oleh waktu dengan adanya kebijakan yang sangat darurat pada publik, atau perubahan keadaan sosial ekonomi yang sesuai dan didasarkan pada teori perundang-undangan secara teknis ataupun memperoleh dukungan publik.

Mutu pendidikan akan tercapai, apabila didukung oleh seluruh komponen dalam pendidikan yang terorganisir dengan baik. Komponen tersebut adalah *input*, *procces*, *output*, guru, sarana, prasarana, biaya, kesemuanya perlu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pihak yang mempunyai peran penting dalam lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah kepala Sekolah. Kepala Sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Sebagai penentu kebijakan di sekolah, kepala sekolah harus memfungsikan kebijakannya secara maksimal dan mampu memimpin Sekolah dengan bijak dan terarah, serta mengarah kepada pencapaian tujuan yang maksimal pula, demi meningkatkan mutu pendidikan (Munir, 2008, h. 6).

Ardin dan Bardawan (2018, h. 126-127) sebagaimana dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa suatu lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta akan bisa bersaing, malahan bisa lebih maju dari lembaga negeri apabila pemimpinnya mempunyai komitmen untuk kemajuan sekolah tersebut, memperhatikan keluhan dan kebutuhan dari masyarakat, serta menunjukkan ciri khas tertentu yang tidak terdapat pada lembaga lain. Maju mundurnya suatu lembaga pendidikan swasta sangat tergantung pada pemimpinnya. Sikap disiplin dan penjagaan kualitas oleh swasta akan tetap menjadi pilihan masyarakat walaupun biaya yang dikeluarkan sedikit banyak tapi jika masyarakat merasa puasa maka akan tetap eksis dan bersaing dengan sekolah negeri.

Kepala sekolah mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap keberhasilan proses pembelajaran di kelas dalam lingkup mikro atau di Sekolah dalam lingkup makro. Hal ini terkandung makna bahwa kepala sekolah sebagai manajer pendidikan adalah merencanakan sesuatu atau strategi yang baik, mengorganisasi dan mengkoordinasi sumber-sumber pendidikan yang berserakan agar menyatu dalam melaksanakan pendidikan, dan mengadakan kontrol terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan (Pidarta, 1997, h. 69).

Kepala sekolah sebagai *top leader* mempunyai wewenang dan kekuasaan, serta kompetensi untuk mengatur dan mengembangkan bawahannya secara profesional. Dengan demikian kepala Sekolah harus memiliki kompetensi profesional yaitu: (1) kepala sekolah sebagai pemimpin, (2) kepala sekolah sebagai manajer, (3) kepala sekolah sebagai pendidik, (4) kepala sekolah sebagai administrator, (5) kepala sekolah sebagai wirausahawan, (6) kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja, dan (7) kepala sekolah sebagai penyelia (Mendikbud, 2007, h. 102-103).

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang paling besar terhadap lembaganya. Hal ini karena merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi gagal atau berhasilnya sebuah lembaga (organisasi).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dan analisis data yang telah peneliti lakukan terkait dengan Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kota Kendari, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Proses kebijakan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga adalah dengan melakukan perencanaan atau perumusan kebijakan yang dibuat kemudian melakukan pengorganisasian agar kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan dan mengimplementasikan kebijakan yang dibuat serta melakukan evaluasi program sekolah, yaitu program *full day school*, bimbingan ibadah dan program ekstrakurikuler.
2. Mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga telah menerapkan delapan Standar Nasional Pendidikan (8 SNP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah dibuat yang mana Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar isi, Standar kompetensi lulusan, Standar proses, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian yang merupakan tugas kepala sekolah dan seluruh *stakholder* untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut walau sarana dan prasarana masih terbatas yaitu tidak adanya perpustakaan sekolah dan musholah. Sehingga status RA Aisyiyah Nurhaq terakreditasi B.

3. Faktor pendukung kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baruga ini, di antaranya: (1) RA Aisyiyah Nurhaq Baruga memiliki guru yang semuanya berpendidikan S-1, (2) Memiliki sarana dan prasana yang cukup mendukung dari lapangan yang cukup luas dan lebar, (3) adanya kekompakan antara guru dalam mendukung segala kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah. Sedangkan faktor penghambat kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu RA Aisyiyah Nurhaq Baru adalah: 1) minimnya pendanaan yang tersedia sehingga kebutuhan atas penuhi sarana dan prasarana masih terbatas, 2) masih ada guru yang melaksanakan tugasnya tidak sesuai tugas fungsionalnya.
4. Implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu di RA Aisyiyah Nurhaq adalah menerapkan program *full day school*, bimbingan ibadah dan kegiatan ekstrakurikuler berupa bimbingan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.

5.2 Limitasi Penelitian

Limitasi atau keterbatasan pada penelitian terletak pada proses penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan hambatan. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian ini adalah waktu dan tempat penelitian. Selama ada wabah Covid-19, proses wawancara dengan subyek penelitian sangat terbatas karena peraturan tentang *work in home* (kerja di rumah) dan *social distancing* (menjaga jarak). Sehingga peneliti tidak bisa untuk terus melakukan wawancara secara intens.

5.3 Rekomendasi

1. Bagi kepala RA Aisyiyah Nurhaq Baruga, dalam meningkatkan mutu RA, harus lebih meningkatkan kemampuan dan kreatifitas dalam mengarahkan organisasi ke arah yang lebih baik. Menumbuhkan budaya organisasi yang sehat, dalam mengelola kegiatan pendidikan dengan mengutamakan rasa kekeluargaan, transparansi, rasa saling membutuhkan sehingga tercipta suasana kondusif. Pembenahan serta pengolaan sarana dan prasarana yang dianggap perlu untuk menunjang kegiatan pendidikan yang baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyadari banyak keterbatasan dalam penelitian ini, baik ditinjau dari penentuan fokus penelitian, waktu pengumpulan data, keterbatasan dalam teknik pengumpulan data, dan keterbatasan dalam membuat konstruksi penelitian, maka diharapkan adanya penelitian selanjutnya yang lebih mengembangkan dan memperdalam kajian dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khluqo, Ihsana. (2015). *Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini: Pendidikan Taman Kehidupan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Apriana, Rista. (2009). *Hubungan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Dengan Perkembangan Kognitif Anak Usia Prasekolah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Semarang*. Tesis tidak dipublikasi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ardin dan Badarwan. (2018). Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dalam Peningkatan Keunggulan Bersaing, *Al-Izzah*, Vol. 13 No. 1.
- Ardy, WN. & Barnawi. (2012). *Format PAUD*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arikunto, S. (2104). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhanuddin, A. (2013). Online: *Pengertian dan Unsur-unsur Pendidikan*. <https://afidburhanuddin.files.wordpress.com/2013/10/2-pengertian-dan-unsurunsur-pendidikan.pdf>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
- Dunn, WN. (1999). *Public Policy Analysis Pengantar Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Engkoswara & Komariah A. (2015). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Freyani, L. (2012). Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Nasional Tahun 2012, (Forum Koordinasi Nasional (Forkonas) Pendidikan Untuk Semua.
- Hasbullah, M. (2016). *Kebijakan Pendidikan dalam Perpektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Helmawati. (2014). *Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah Melalui Managerial Skills*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiryanto, dkk. (2010). *Pemetaan Tingkat Pencapaian Mutu Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Yogyakarta.

- Imron, A. (2008). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia; Proses, Produk, dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indah, Y. (2016). *Kebijakan Sertifikasi, Kinerja, dan Kesejahteraan Guru*. Yogyakarta: Deepublish.
- Islamy, I. (2001). *Policy Analysis*. Malang: Program Pascasarjana Unibraw.
- Istiqomah, L. (2016). "Tiga Pilar Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan PAUD", *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Volume 1 No. 2.
- Margono, S. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Matin & Fuad, N. (2016). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Max, M. (1991). *Can Teaching Be Taught? Or Are Real Teachers Found or Made?*. Department of Secondary Education, University of Albert.
- Mendikbud. (2007). *Standar Kompetensi Kepala Sekolah TK, SMP, SMA, dan SLB*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Miles, MB. & Huberman M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Moleong, LJ. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhaimin, dkk. (2009). *Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhson, A. (2008). *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: FSE UNY.
- Mulyasa, E. (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik Implementasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyasa E. (2011). *Manajemen Pendidikan Karakter*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Cet. 3; Jakarta: Bumi Aksara.

- Munir, A. (2008). *Menjadi Kepala Sekolah Efektif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Musbikin, I. (2010). *Buku Pintar PAUD dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Laksana.
- Mutohar, PM. (2013). *Manajemen Mutu Sekolah Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Nasution, I. (2017). *Profesi Kependidikan*. Depok: Prenada Media Group.
- Noorlaila, I. (2010). *Panduan Lengkap Mengajar PAUD*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Nurdin, M. (2005). *Pendidikan yang Menyebalkan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: BSNP.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 19 Ayat 1.
- Pidarta, M. (1997). *Landasan Kependidikan: Stimulu Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Bandung: Rineka.
- Purwanto, N. (1984). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Mutiara.
- Purwanto. (2010). *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahayu, N. (2015). *Peningkatan Mutu Pendidikan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fatimah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo*. Thesis tidak dipublikasi. Surakarta: Program Pascasarjana IAIN.
- Rajagukguk B. (2009). *Paradigma Baru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jurnal Tabularasa PPS UNIMED, Vol.6 No.1.
- Rasmi. (2015) *Peningkatan Mutu dan Profil Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Total Quality Management (TQM)*. Al-Ta'dib, Vol. 10 No. 2.
- Rivai, V. & Murni, S. (2010). *Education Management: Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohman, A. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

- Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sagala, Syaiful. (2009). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Shaleh, AR. (2004). *Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi, dan Aksi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudijono, A. (2005). *Pengantar Evaluasi Pendidikan. Ed. 1, Cet. 5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudiyono. (2007). *Buku Ajar: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, NS. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suparlan. Online. "membandingkan beberapa konsep dan kebijakan pendidikan", <http://www.suparlan.com/pages/posts/membandingkan-beberapa-konsep-dankebijakan-pendidikan-33.php>, diakses pada 9 September 2019.
- Suryadi, A. & Tilaar H. (1994). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, A. & Budimansyah, D. (2009). *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional, Konsep, Teori, dan Aplikasi dalam Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Suyadi, MU. (2013). *Konsep Dasar PAUD*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syafaruddin. (2002). *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jakarta: Grafindo.
- Syafaruddin. (2008). *Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Yang Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Syafaruddin & Asrul. (2014). *Manajemen Kepengawasan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media.
- Syafaruddin & Asrul. (2015). *Kepemimpinan Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Citapustaka Media.
- Tabrani, ZA. dkk. (2013). *Aktualisasi Kebijakan dalam Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*. *Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2.
- Taufan, Johandri, Fachri M. (2014). *Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X di Kota Jambi*, *Jurnal Penelitian Pendidikan, LPPM Universitas Pendidikan Indonesia*, Vol. 14 No. 1.
- Tilaar, H.A.R. & Nugroho R. (2008). *Kebijakan Pendidikan, Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Public*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wahab, A. (2022). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yanto, M. & Fathurrochman, I. *Manajemen Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. *Konseling dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 3.
- Zahid, G. (2014). *Role of Career Education Advisor/Expert and Teaching Quality in Student Employability Skills as the Outcome of Higher Education*, *Mediterranean Journal of Social Sciences*, MCSER Publishing, Rome-Italy. Vol 5 No. 27.
- Zulkifli. (2015). Eksistensi Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah di Provinsi Sulawesi Tenggara, *Al-Izzah*, Vol. 10 No. 2.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Instrumen Wawancara dengan Kepala Sekolah

1. Bagaimana proses kebijakan yang anda buat di sekolah ini?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu di sekolah ini?
3. Kebijakan apa saja yang diterapkan ibu dalam upaya peningkatan mutu di sekolah?
4. Apakah kebijakan yang telah ibu buat diterima oleh sekolah, alasannya?
5. Dari kebijakan yang ibu buat, bagaimana cara menerapkan kebijakan tersebut?
6. Langkah-langkah apa yang dilakukan ibu dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu sekolah ini?
7. Bagaimana anda membangun komunikasi dengan warga sekolah ini?
8. Bagaimana dengan proses perekrutan siswa di sekolah ini?
9. Bagaimana upaya anda untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik di sekolah ini?
10. Dalam hal pembiayaan program sekolah, dari mana sumber pembiayaannya?
11. Bagaimana dengan keadaan sarana prasarana di sekolah ini?
12. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan anda di sekolah?
13. Apa saja faktor penghambat kebijakan anda dalam meningkatkan mutu di RA Aisyiyah Nurhaq ini?

B. Instrumen Wawancara dengan Guru

1. Bagaimana proses kebijakan yang anda buat di sekolah ini?
2. Selama ibu menjadi guru di sini, kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah?
3. Bagaimana tanggapan anda terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh kepala sekolah?
4. Bagaimana proses pengambilan keputusan? Apakah semua warga sekolah selalu dilibatkan?
5. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu sekolah ini?
6. Bagaimana anda membangun komunikasi dengan warga sekolah ini?
7. Bagaimana dengan proses perekrutan siswa di sekolah ini?
8. Bagaimana upaya anda untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik di sekolah ini?
9. Dalam hal pembiayaan program sekolah, dari mana sumber pembiayaannya?
10. Bagaimana dengan keadaan sarana prasarana di sekolah ini?
11. Apakah faktor yang mendukung kebijakan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu di RA Aisyiyah Nurhaq ini?
12. Apa saja faktor penghambat dalam meningkatkan mutu di sekolah?

PANDUAN OBSERVASI (PENGAMATAN)

Kode	Aktivitas	Subjek	Hal yang Diamati
O-01	Pembelajaran	Guru, siswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kelas 2. Suasana kelas selama pembelajaran 3. Keaktifan guru dalam pembelajaran 4. Partisipasi siswa dalam pembelajaran 5. Pemanfaatan APE di kelas
O-02	Rapat Koordinasi	Kepala sekolah, guru, Staf, dan Wali Murid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang rapat 2. Partisipasi peserta rapat 3. Suasana selama rapat 4. Antusiasme peserta rapat 5. Cara kepala sekolah menanggapi usulan. 6. Cara kepala sekolah mengambil keputusan
O-03	Sarana Prasarana	Kepala Sekolah, Guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan ruang belajar 2. Bahan dan alat yang dipakai dalam pembelajaran 3. Ketersediaan sarana pendukung
O-04	Pembiayaan	Kepala sekolah, Guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kepala Sekolah 2. Pemberian bantuan kepada siswa yang tidak mampu 3. Pembahasan rencana anggaran sekolah

PANDUAN ANALISIS DOKUMEN

Kode	Jenis Dokumen	Hal yang Dianalisis
D-01	Profil RA Aisyiyah Nurhaq	1. Visi dan misi RA Aisyiyah Nurhaq 2. Tujuan RA Aisyiyah Nurhaq 3. Susunan Organisasi RA Aisyiyah Nurhaq
D-02	Sarana Prasarana	1. Sarana Prasarana RA Aisyiyah Nurhaq 2. Media Pembelajaran RA Aisyiyah Nurhaq
D-03	Presensi Mengajar	1. Jumlah guru 2. Keaktifan guru mengajar 3. Pembagian tugas guru
D-04	Lembar Daftar Siswa	Daftar Jumlah Murid
D-05	Lembar Laporan Bulanan	Evaluasi belajar anak didik
D-06	Dokumen Akreditasi	1. Kelengkapan dokumen akreditasi 2. Bukti hasil akreditasi 3. Izin operasional

Lampiran 2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. Hasil Wawancara dengan Kepala RA Aisyiyah Nurhaq Baruga (Ibu Samsia)

1. Bagaimana proses kebijakan yang anda buat di sekolah ini?

Jawaban: Kalau proses pelaksanaan program *full day school* sebelum saya dan seluruh guru di sekolah ini membuat sistem *full day school* merupakan rencana awal untuk membangun sekolah ini dimana kegiatan pembelajaran adalah *full* kegiatannya yaitu dari jam 07.15 samapai dengan 17.00 yang merupakan suatu ketetapan dari yayasan dan saya serta para guru-guru yang ingin memajukan sekolah ini. Proses program *full day school* adalah dengan memberikan semangat terhadap guru dan para peserta didik agar mereka lebih giat dalam mengajar dan belajar sehingga mutu yang dihasilkan dapat tercapai yaitu menghasilkan lulusan-lulusan terbaik atau unggul seperti yang tertera dalam visi dan misi sekolah. Saya juga akan selalu mengevaluasi apakah berjalan program yang saya buat, jika program yang saya buat menagalami masalah maka saya akan mengantisipasinya dengan melihat masalah apa yang terjadi.

2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu di sekolah ini?

Jawaban: Untuk meningkatkan standar isi saya melakukan pendalaman materi pembelajaran guna mancapai standar kompetensi yang saya tuangkan dalam kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran mana di sekolah RA Aisyiyah Nurhaq Baruga telah mempunyai silabus dan RPPM dan RPPH menunjang proses pembelajaran agar berjalan sesuai tujuan. Mengenai Standar pendidik adalah dengan memberikan motivasi dan dukungan agar pendidik dapat profesional dan memilki kinerja yang baik dalam mendidik peserta didik sehingga menghasilkan lulusan-lulusan terbaik. Untuk meningkatkan mutu melalui standar tenaga kependidikan adalah dengan membuat suatu peraturan di mana para guru di sekolah ini

diharuskan untuk melakukan tugasnya dengan cara yang profesional. Mengenai Standar sarana dan prasarana di sekolah ini adalah baik dan sudah cukup memadai walaupun masih ada beberapa sarana prasarana yang masih terbatas namun tidak menghambat kegiatan siswa, masih dalam tahap perbaikan sarana dan prasana yang kurang.

Untuk Standar pengelolaan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga adalah saya kepala sekolah telah melakukan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan kegiatan agar tercapai efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan dengan membuat suatu kebijakan atau program yang meningkatkan mutu pendidikan yang salah satunya adalah dengan program *full day school*. Standar penilaian di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga kepala sekolah yang guna melihat kinerja profesional guru adalah dengan melakukan suatu supervisi yang sesuai dengan mekanisme, dan prosedur evaluasi.

3. Kebijakan apa saja yang diterapkan ibu dalam upaya peningkatan mutu di sekolah?

Jawaban: Di sini saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru yang bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan agar siswa dan seluruh komponen sekolah berjalan sesuai dengan tujuan hal yang pertama. Saya buat adalah membuat suatu kebijakan berupa sistem *full day school*, bimbingan ibadah dan eksrakurukuler dimana sebelum di laksanakan disosialisasikan dulu dengan guru-guru dan meminta pendapat mereka.

4. Apakah kebijakan yang telah ibu buat diterima oleh sekolah, alasannya?

Jawaban: Ya, mereka semua guru-guru di sini dan juga wali murid menerima dan sepakat dengan program yang saya buat. Apalagi orang tua murid sangat senang dengan program sekolah *full day* ini. Sebab mereka merasa terbantu untuk anak-anak mereka terus terkontrol kesehariannya mulai pagi sampai sore.

5. Dari kebijakan yang ibu buat, bagaimana cara menerapkan kebijakan tersebut?

Jawaban: Mengenai program tentang sistem *full day school* penerapannya adalah dengan membuat inovasi-inovasi yang baru agar orang tua dan peserta didik yang ingin masuk ke sekolah ini terasa nyaman inovasi tersebut ialah saya menyediakan sarana berupa AC dan kipas angin di dalam kelas. Adanya sistem *full day school* ini lamanya waktu pembelajaran tidak akan menjadi beban, karena sebagian waktunya digunakan untuk bermain. Adapun pembinaan ibadah yang dilaksanakan di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari yaitu, sholat berjamaah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah (sholat Dhuha), dan mengenai penerapan program ekstrakurikuler di sini berupa bimbingan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang masing-masing diprogramkan 2 kali kegiatan dalam satu pekan.

6. Langkah-langkah apa yang dilakukan ibu dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu sekolah ini?

Jawaban: Saya melakukan komunikasi dengan guru-guru dan orang tua murid, merekrut siswa baru, meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya, berusaha meningkatkan sumber biaya sekolah, dan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

7. Bagaimana anda membangun komunikasi dengan warga sekolah ini?

Jawaban: Dalam membuat sebuah kebijakan atau keputusan saya biasanya mengadakan rapat guna bertukar pendapat. Dalam mengambil keputusanpun saya tidak serta merta sepihak, walaupun sudah mempunyai program, tapi sebelum konsep itu digulirkan, saya tawarkan terlebih dahulu kepada guru dan orangtua siswa. Jika sudah sepakat baru dirumuskan. Program itu dibahas lewat rapat dengan guru kelas, rapat dengan guru karyawan, serta rapat dengan orangtua murid.

8. Bagaimana dengan proses perekrutan siswa di sekolah ini?

Jawaban: Di sekolah ini, kami merekrut peserta didik di awal tahun pelajaran. Penerimaan peserta didik baru diterima oleh panitia yang sudah dibentuk.

9. Bagaimana upaya anda untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik di sekolah ini?

Jawaban: Banyak hal yang dilakukan dan para guru-guru sekolah seperti yang belum lama ini mengadakan kegiatan bimbingan. Kegiatan bimbingan berupa bimbingan penyusunan perangkat pembelajaran.

10. Dalam hal pembiayaan program sekolah, dari mana sumber pembiayaannya?

Jawaban: Kalau pembiayaan di sekolah ini sama dengan sekolah yang lain, yaitu ada dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudhatul Athfal yang berasal dari Kementerian Agama. Selain itu juga ada sumbangan dari orang tua siswa. Sebelum menggunakan anggaran tersebut, kami membuat rencana penggunaan anggaran mengenai item apa saja yang akan diadakan untuk dibiayai. Penggunaan anggaran ini kemudian disampaikan kepada guru-guru.

11. Bagaimana dengan keadaan sarana prasarana di sekolah ini?

Jawaban: Saat ini sudah cukup memadai walau masih dalam tahap penyediaan sarana dan pembanguna prasarana sekolah namun tidak menghambat kegiatan belajar murid.

12. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan anda di sekolah?

Jawaban: Ada beberapa faktor yang cukup mendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini, antara lain, tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini rata-rata lulusan S-1, RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari merupakan sekolah yang dinginkan oleh masyarakat, dan memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari halaman yang cukup luas.

13. Apa saja faktor penghambat kebijakan anda dalam meningkatkan mutu di RA Aisyiyah Nurhaq ini?

Jawaban: Adapun yang menjadi kendala untuk menerapkan kebijakan saya dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini adalah masih ada tenaga pendidik di sekolah ini masih jauh dari harapan dan harus terus dibimbing. Kendala lainnya adalah masalah pendanaan yang masih dirasa minim.



B. Hasil Wawancara dengan Guru RA Aisyiyah Nurhaq

1. Bagaimana proses kebijakan yang anda buat di sekolah ini?

Jawaban:

Risnawati: Proses kebijakan kepala sekolah yang beliau buat adalah melakukan perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan dan melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang beliau buat.

Raminatin: Proses kebijakan yang beliau programkan adalah melakukan perencanaan, mengorganisasikannya, melaksanakan dan melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan program tersebut berupa sistem *full day school*, bimbingan ibadah dan ekstrakurikuler.

Fitriani: Seperti yang saya lihat proses kebijakan kepala sekolah yang beliau buat adalah melakukan perencanaan, mengorganisasikan, mengimplemtasi dan melakukan evaluasi program tersebut berupa sistem *full day school*, bimbingan ibadah dan ekstrakurikuler beliau melakukannya dengan baik.

2. Selama ibu menjadi guru di sini, kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah?

Jawaban:

Hamsinang: Untuk peningkatan mutu di sekolah ini, kepala sekolah selalu menupervisi supaya guru-guru mengajar sesuai target pembelajaran. Kepala sekolah sangat mengapresiasi dengan semua kegiatan pengembangan yang sifatnya baik untuk guru. Jadi hampir semua kegiatan yang kami usulkan itu selalu disetujui.

Risnawati: Secara umum kepala sekolah adalah penanggungjawab bahwa setiap apapun kegiatan pasti diketahui kepala sekolah artinya saya melihat lebih pada pengawasan ada bimbingan. Dari sisi pengawasan kepala sekolah ini terkadang memberikan rambu-rambu mana kegiatan yang boleh dilakukan mana yang tidak, dari sisi bimbingan kepala sekolah selalu mengawal proses kegiatan ini supaya terus berjalan dan sesuai dengan tujuan. Tugas supervisi dari sekolah ini sampai sekarang berjalan sangat

baik karena kepala sekolah selalu terlibat apapun kegiatan yang dilakukan oleh sekolah.

Jaemula: Kebijakan kepala sekolah sangat besar dalam memutuskan apakah ini layak atau tidak untuk dilaksanakan di sekolah ini, beliau yang menentukan tapi tentu hasil dari musyawarah bersama tidak kemudian memutuskan secara sepihak itu semua dari keputusan bersama di situlah letak peran penting dari kepala sekolah untuk memutuskan sebuah kebijakan lantas kemudian kami yang mengatur bagaimana berjalannya kebijakan tersebut. Selain itu pemimpin sekolah juga mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pelaksanaan atau proses pembelajaran.

Sandrayani: Kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini yaitu membuat program *full day school*, kegiatan ekstrakurikuler Bahasa Inggris dan Arab.

3. Bagaimana tanggapan anda terhadap mutu di sekolah ini?

Jawaban:

Risnawati: Mutu pendidikan sekolah ini adalah dengan menggunakan 8 SNP di mana merupakan tugas kepala sekolah dan seluruh komponen sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini walau memiliki sedikit masalah yaitu mengenai sarana dan prasarana yang kurang yaitu tidak adanya perpustakaan sekolah, dan musholah serta guru yang perlu bimbingan dalam mengajar maka dari yang saya lihat kepala sekolah selalu membimbing dan memotivasi mereka dengan lebih baik.

Raminatin: Mutu pendidikan sekolah ini ada 8 standar pendidikan. Tugas kepala sekolah dan seluruh komponen sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini sebagaimana saya ketahui walau sarana dan prasarana yang terbatas tidak membuat para siswa merasa tidak nyaman sehingga pembelajaran berjalan dengan baik.

Fitriani: Mutu pendidikan sekolah ini sudah sesuai dengan standar pendidikan sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar.

4. Bagaimana proses pengambilan keputusan? Apakah semua warga sekolah selalu dilibatkan?

Jawaban:

Fitriani: Kepala sekolah menyampaikan idenya memutuskan apakah kegiatan yang diadakan layak atau tidak untuk dilaksanakan di sekolah ini, beliau yang menentukan tapi tentu hasil dari musyawarah bersama. Kemudian kami yang mengatur bagaimana berjalannya kebijakan tersebut.

Risnawati: Saat ini dari yang dilihat kebijakan atau program yang telah di buat oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu adanya sistem *full day school*, pembinaan ibadah dan ekstrakurikuler di mana sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut, disosialisasikan dulu dengan guru-guru.

Raminatin: Kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah adalah suatu program yaitu adanya *full day school*, adanya ekstrakurikuler. Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, terlebih dahulu kepala sekolah membuat suatu sosialisasi dulu dengan guru-guru dan meminta pendapat guru-guru.

Jaemula: Untuk meningkatkan mutu pendidikan oleh kepala sekolah kebijakan yang bertama beliau buat adalah membuat program *full day school*, kegiatan ekstrakurikuler berupa bimbingan bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Sebelum kegiatan itu dijalankan, kepala sekolah mensosialisasikan dulu kepada guru-guru.

5. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu sekolah ini?

Jawaban:

Risnawati: Mengenai program tentang sistem *full day school* penerapannya adalah dengan membuat kegiatan yang menarik agar orang tua dan peserta didik yang ingin masuk ke sekolah ini terasa nyaman inovasi tersebut ialah saya menyediakan sarana berupa AC dan kipas angin di dalam kelas. Penerapan program ekstrakurikuler di sini berupa bimbingan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab setiap dua kali pertemuan setiap pekan.

Sandrayani: Program tentang *full day school* ini, siswa merasa nyaman dengan program ini karena di kelas disediakan AC dan kipas angin agar siswa tidak merasa gerah. Untuk pembiasaan ibadah *alhamdulillah* kami guru-guru dan juga kepala sekolah membiasakan melatih kesadaran para siswa untuk melakukan hal-hal yang baik yaitu bernilai ibadah seperti melakukan shalat wajib berjamaah dan begitu juga dengan shalat sunnah. Mengenai penerapan program ekstrakurikuler di sini diberikan bimbingan Bahasa Arab dan Inggris.

6. Bagaimana anda membangun komunikasi dengan kepala sekolah ini?

Jawaban:

Risnawati: Menurut saya, kepala sekolah dapat menyelesaikan masalah di sekolah ini dengan baik sehingga semua pihak merasa dihargai dalam berpendapat yaitu dalam mengambil sebuah kebijakan ataupun senantiasa dirapatkan dengan melalui rapat guru dan orangtua murid.

Raminatin: Mengenai kepala sekolah, beliau dalam membuat suatu kebijakan atau menetapkan suatu program yang harus dijalankan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan beliau senantiasa menerima saran dan masukan dari siapa pun terhadap masalah apapun. Setiap kebijakan yang beliau buat senantiasa dirapatkan dulu dengan melalui melalui rapat.

Fitriani: Kepala sekolah dalam membuat suatu kebijakan suatu program yang harus dijalankan, beliau menerima saran dan masukan dari guru dan selalu menyelesaikan setiap masalah melalui melalui rapat guru-guru yang dilakukan beberapa kali dalam satu semester.

7. Bagaimana dengan proses perekrutan siswa di sekolah ini?

Jawaban:

Raminatin: Dalam menerima murid baru di sekolah ini diterima oleh panitia yang sudah dibentuk oleh kepala sekolah bersama guru-guru.

Risnawati: Perekrutan murid-murid baru dilaksanakan di awal tahun ajaran baru. Penerimaan murid baru ini dilakukan oleh panitia yang sudah dibentuk sebelumnya oleh kepala sekolah dan guru-guru.

8. Bagaimana upaya anda untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik di sekolah ini?

Jawaban:

Risnawati: Ada semacam pembimbingan untuk guru tertentu misalnya pembuatan perangkat pembelajaran. Untuk guru-gurunya nanti kalau misalnya ada pembuatan RPPM, RPPH, dan sebagainya. Jadi, ada semacam pembimbingan yang mendukung tugas guru.

Raminatin: Seperti yang diketahui, kepala sekolah mengadakan bimbingan penyusunan perangkat pembelajaran. Kalau yang dilakukan persemester seperti rapat-rapat untuk meningkatkan kualitas guru.

Fitriani: Kepala sekolah bimbingan penyusunan perangkat pembelajaran untuk guru. Jadi ada semacam pendampingan yang mendukung tugas masing-masing guru ada tersendiri.

9. Dalam hal pembiayaan program sekolah, dari mana sumber pembiayaannya?

Jawaban:

Risnawati: Sumber pembiayaan sekolah ini dari BOP dan iuran bulanan dari orang tua siswa. Bagi siswa yang tidak mampu, dibebaskan dari segala iuran. Sebelum menggunakan anggaran itu biasanya kepala sekolah membahas rencana penggunaan anggaran untuk membiayai apa saja kebutuhan sekolah.

Raminatin: Sebagian dibiayai oleh BOP, sebagian lagi dari iuran bulanan siswa (Komite dan bantuan lain yang tidak mengikat). Biaya tersebut digunakan sesuai dengan rencana penggunaan anggaran yang telah disusun sebelumnya untuk kebutuhan sekolah.

10. Bagaimana dengan keadaan sarana prasarana di sekolah ini?

Jawaban:

Risnawati: Kelasnya sudah nyaman karena sarana pembelajaran, media pembelajaran dan alat permainan edukatif (APE) sudah tersedia.

Jaemula: Di sini seluruh kebutuhan dalam hal pembelajaran telah terpenuhi seperti jika panas maka AC dan kipas angin telah disediakan oleh pihak sekolah sehingga murid-murid merasakan nyaman dalam belajar.

Fitriani: Seluruh kebutuhan dalam hal pembelajaran telah terpenuhi seperti jika panas, maka AC dan kipas angin telah disediakan oleh pihak sekolah sehingga murid merasakan nyaman belajar di kelas.

11. Apakah faktor yang mendukung kebijakan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu di RA Aisyiyah Nurhaq ini?

Jawaban:

Sandrayani: Salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini adalah, sekolah ini adalah sekolah yang diinginkan oleh banyak masyarakat, selain itu faktor lain adalah guru-guru di sekolah ini rata-rata Sarjana dan memiliki kepribadian yang baik dalam mendidik murid. Ditambah juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari halaman bermain cukup luas.

Jaemula: Ada beberapa faktor pendukung di lembaga ini, RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari adalah guru-guru di sekolah ini semuanya berpendidikan S-1, sekolah ini adalah sekolah yang diminati oleh banyak masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Hamsinang: Faktor yang cukup mendukung di sekolah ini, seperti guru-guru sudah sarjana, *Alhamdulillah* sarana dan prasarana yang cukup mendukung dari lapangan yang cukup luas dan lebar, juga ditambah lagi adanya kekompakan antara guru dalam mendukung segala kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah yaitu kepala sekolah.

12. Apa saja faktor penghambat dalam meningkatkan mutu di sekolah?

Jawaban:

Raminatin: Tidak ada sekolah yang tidak memiliki hambatan dari segala hal apalagi dalam hal peningkatan mutu pendidikan semua tidak terlepas dari segi pendanaan yang minim juga ditambah SDM yang lemah.

Risnawati: Kalau berbicara faktor penghambat memanglah tidak terlepas dari masalah pendanaan yang kurang untuk pemenuhan sarana dan prasarana sekolah.

Sandrayani: Faktor penghambat tidak lain dari mengenai pendanaan yang ada maka akibatnya masih ada beberapa program atau kebijakan yang belum terealisasi dengan baik.



Lampiran 3

HASIL ANALISIS DOKUMEN

Kode	Jenis Dokumen	Hal Yang Dianalisis	Hasil Analisis	
			Ada	Tdk Ada
D-01	Profil RA Aisyiyah Nurhaq	Visi dan misi RA Aisyiyah Nurhaq	√	
		Tujuan RA Aisyiyah Nurhaq	√	
		Susunan Organisasi RA Aisyiyah Nurhaq	√	
D-02	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana RA Aisyiyah Nurhaq	√	
		Media Pembelajaran RA Aisyiyah Nurhaq	√	
D-03	Presensi Mengajar	Data guru	√	
		Daftar Kehadiran Guru	√	
		SK Pembagian tugas guru	√	
D-04	Lembar Daftar Siswa	Data Murid	√	
D-05	Lembar Laporan Bulanan	Hasil Evaluasi belajar anak didik	√	
D-06	Dokumen Akreditasi	Instrumen Akreditasi PAUD	√	
		Sertifikat Akreditasi	√	
		SK Izin Operasional	√	

Lampiran 4

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Samsia, M.Pd	Kepala Sekolah	
2	Raminatin, S.Pd	Guru Kelas	
3	Sandrayani, S.Pd	Guru Kelas	
4	Hamsinang, S.Pd.I	Guru Kelas	
5	Risnawati, S.Pd	Guru Kelas	
6	Fitriani, S.Pd	Guru Kelas	
7	Jaemula, S.Pd	Guru Pendamping	

Lampiran 5

FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Gambar 1. Visi, Misi dan Tujuan RA Aisiyah Nurhaq



Gambar 2. Proses Pembelajaran RA Aisiyah Nurhaq (1)



Gambar 3. Proses Pembelajaran RA Aisiyah Nurhaq (2)



Gambar 4. Wawancara dengan Kepala RA Aisiyah Nurhaq



Gambar 5. Wawancara dengan Guru RA Aisyiyah Nurhaq (1)



Gambar 6. Wawancara dengan Guru RA Aisyiyah Nurhaq (2)



Gambar 7. Rapat Bersama Wali Murid (1)



Gambar 8. Rapat Bersama Wali Murid (2)

Lampiran 6

INSTRUMEN AKREDITASI PAUD TAHUN 2019 Instrumen EDS-PA LKP v2.0

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1.1 Tingkat Pencapaian Pertumbuhan dan Perkembangan

1.1.1 Pencapaian Pertumbuhan

Dokumen rekap Pencapaian Pertumbuhan anak yang berisi:

- Berat badan
- Tinggi badan
- Lingkar kepala
- Tidak memiliki dokumen

1.1.2 Pencapaian Pertumbuhan

Dokumen Analisis Pencapaian Pertumbuhan semua anak sesuai kelompok usia, yang meliputi:

- Grafik Berat Badan berbanding Tinggi Badan
- Grafik Tinggi Badan berbanding Usia
- Grafik Lingkar Kepala
- Tidak memiliki dokumen

1.1.3 Pencapaian Perkembangan

Dokumen Data Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak sesuai dengan kelompok usia yang meliputi aspek perkembangan:

- Nilai Agama dan Moral
- Fisik Motorik
- Kognitif
- Bahasa
- Sosial Emosional
- Seni
- Tidak memiliki dokumen

1.1.4 Pencapaian Perkembangan

Dokumen deteksi Pencapaian Perkembangan Anak sesuai Kelompok Usia yang dapat berupa (pilih salah satu):

- DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak)
- KMS (Kartu Menuju Sehat) Terpadu
- KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan) dalam buku SDIDTK
- Tidak memiliki dokumen

STANDAR ISI

2.1 Kurikulum

2.1.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Dokumen KTSP yang terdiri atas:

- Visi
- Misi
- Tujuan
- Muatan Pembelajaran yang mengacu pada KI dan KD
- Pengaturan lama belajar
- Kalender Pendidikan
- Program Semester
- Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM)
- Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)
- Tidak memiliki dokumen

2.1.2 Acuan Kurikulum

Dokumen acuan kurikulum berdasarkan standar berikut:

- Nasional
- Internasional, sebutkan
- Acuan yang menunjukkan kekhasan satuan, sebutkan
- Tanpa acuan standar/Tidak memiliki dokumen

2.1.3 Kurikulum

Dokumen evaluasi kurikulum satuan (KTSP):

- Notulen rapat yang beragendakan evaluasi kurikulum
- Daftar hadir rapat
- Berita acara hasil rapat berkenaan dengan kurikulum sebelumnya dan kurikulum yang baru ditetapkan
- Penetapan kurikulum yang akan digunakan
- Tidak ada dokumen

2.2 Kompetensi

2.2.1 Perilaku keselamatan diri

Dokumen panduan tentang perilaku keselamatan diri anak yang dimiliki, (bisa 1 dokumen atau lebih), yaitu:

- Perlindungan terhadap kekerasan fisik
- Perlindungan terhadap kejahatan seksual
- Perlindungan terhadap kekerasan psikis
- Perlindungan terhadap diskriminasi
- Tidak ada dokumen

STANDAR PROSES

3.1 Perencanaan Pembelajaran

3.1.1 Program Semester (Prosem)

Dokumen Program Semester yang memuat minimal unsur:

- Daftar tema
- Sub tema dalam setiap tema
- Alokasi waktu setiap tema
- Kompetensi dasar dalam setiap tema
- Tidak memiliki dokumen

3.1.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM)

Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) yang memuat minimal unsur:

- Identitas program layanan (nama satuan semester, bulan/minggu, tema sub tema, kelompok usia)
- Aspek Pengembangan dan Kompetensi Dasar yang dipilih
- Materi pembelajaran
- Rencana kegiatan
- Tidak memiliki dokumen

3.1.3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)

Dokumen RPPH dengan minimal unsur:

- Identitas Program (Nama satuan, Semester/Bulan/Minggu, Hari/tanggal/Bulan/Tahun)
- Tema/Sub tema
- Kelompok usia
- Alokasi Waktu
- Kegiatan Pembukaan
- Kegiatan Inti
- Kegiatan Penutup
- Penilaian perkembangan anak
- Media (Alat dan bahan)
- Tidak memiliki dokumen

3.1.4 Program Holistik Integratif

Dokumen pelaksanaan program Holistik-Integratif yang mencakup:

- Layanan Kesehatan
- Gizi
- Perawatan
- Pengasuhan
- Perlindungan

- Tidak memiliki dokumen

3.2 Keterlibatan Orangtua

3.2.1 Keterlibatan Orangtua

Dokumen bentuk keterlibatan orangtua pada satuan PAUD

- Buku penghubung orangtua dengan guru
- Pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan
- Menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan Pendidikan
- Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran
- Berperan aktif dalam kegiatan dalam komite sekolah/persatuan orangtua murid
- Tidak memiliki dokumen

3.3 Pengawasan Pembelajaran

3.3.1 Supervisi Pembelajaran

Kepala satuan pendidikan memiliki dokumen supervisi proses pembelajaran yang memuat minimal unsur:

- Waktu pelaksanaan supervisi
- Nama guru yang disupervisi
- Temuan supervisi
- Tindak lanjut supervisi
- Tidak memiliki dokumen

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

4.1 Pendidik

4.1.1 Pendidik

Kualifikasi Akademik (Dokumen Ijazah)

Nama	Pendidikan Terakhir	Jenis PTK	Unggah File

4.1.2 Pendidik

Kualifikasi Kompetensi (Dokumen Sertifikat Kursus, Pelatihan, Workshop Seminar, dsb)

Nama	Unggah File

4.2 Tenaga Kependidikan

4.2.1 Tenaga Kependidikan

Kualifikasi Akademik (Dokumen Ijazah)

Nama	Pendidikan Terakhir	Jenis PTK	Unggah File

4.2.2 Tenaga Kependidikan

Kualifikasi Kompetensi (Dokumen Sertifikat Kursus, Pelatihan, Workshop Seminar, dsb)

Nama	Unggah File

STANDAR SARANA DAN PRASANA

5.1 Sarana

5.1.1 Sarana

Dokumen ketersediaan Alat Permainan Edukatif (APE), antara lain :

- Alat bermain sensorimotor (bola berbagai ukuran, plastisin, tanah liat, play dough, dll)
- Alat bermain peran (boneka, profesi, alat masak,dll)
- Alat bermain pembangunan (balok, puzzle, pasir, dll)
- Alat bermain seni (alat musik, alat lukis, dll)
- Alat bermain keaksaraan (buku, alat tulis, gambar,dll)
- Alat bermain luar (prosotan, tangga pelangi, papan titian, dll)
- Tidak memiliki APE

5.1.2 Sarana

Dokumen sarana kebersihan

- Jamban/Toilet dengan air bersih (unggah dokumen foto)
- Fasilitas cuci tangan (unggah dokumen foto)
- Tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar (unggah dokumen foto)
- Tidak memiliki sarana kebersihan

5.2 Prasarana

5.2.1 Luas Lahan

Dokumen luas lahan yang digunakan:

- > 500 m²
- 300 - 500 m²
- 100 - < 300 m²
- < 100 m²
- Tidak memiliki dokumen

5.2.2 Status Lahan

Dokumen status lahan yang digunakan satuan PAUD

- Milik sendiri

- Sewa
- Tidak memiliki dokumen status lahan

5.2.3 Jenis Ruang

Dokumen jenis yang dimiliki:

- Ruang kegiatan anak
- Ruang pendidik dan tenaga kependidikan
- Ruangan lainnya, sebutkan:

5.2.4 Ketersediaan Instalasi

Dokumen fasilitas instalasi yang dimiliki:

- Listrik/penerangan lain
- Air
- Alat komunikasi (telephone/Hp)
- Internet
- Tidak memiliki dokumen

STANDAR PENGELOLAAN

6.1 Perencanaan

6.1.1 Visi, Misi dan Tujuan

Dokumen Kelembagaan yang dimiliki meliputi:

- Visi
- Misi
- Tujuan
- Tidak memiliki dokumen

6.1.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dokumen RKT yang berisi perencanaan tentang:

- Peserta didik
- Kurikulum dan kegiatan pembelajaran
- Pendidik dan tenaga kependidikan
- Sarana dan prasarana
- Pendanaan
- Peran serta masyarakat
- Tidak memiliki dokumen

6.1.3 Kalender Pendidikan

Dokumen Kalender Pendidikan memuat unsur:

- Penetapan awal tahun ajaran
- Waktu efektif pembelajaran
- Hari-hari libur yang bersifat fleksibel

- Penetapan akhir tahun ajaran
- Penetapan waktu penyerahan laporan berkala
- Lainnya, sebutkan sebanyak yang ada pada satuan ini:

6.2 Pengorganisasian

6.2.1 Struktur Organisasi

Dokumen struktur organisasi memuat unsur:

- Personalia
- Jabatan personalia
- Alur tanggungjawab
- Tidak memiliki dokumen struktur organisasi

6.2.2 Deskripsi tugas pokok dan fungsi

Memiliki dokumen deskripsi tugas pokok dan fungsi dari :

- Kepala PAUD
- Pendidik/Guru
- Tenaga kependidikan
- Tidak memiliki dokumen

6.3 Pelaksanaan

6.3.1 Panduan Pelaksanaan

Dokumen Panduan Pelaksanaan yang digunakan:

- Panduan pengembangan kurikulum
- Panduan pelaksanaan pembelajaran
- Panduan penggunaan sarana prasarana
- Panduan administrasi dan ketatausahaan
- Panduan program keorngtuaan
- Panduan lainnya:
- Tidak memiliki dokumen

6.3.2 Layanan Menurut Kelompok Usia

Dokumen daftar anak didik sesuai dengan kelompok usia yang dilayani:

Daftar anak didik	Jml Anak	Jml Guru
<input type="checkbox"/> Kelompok sejak lahir – 2 tahun	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Kelompok 2 – 4 Tahun	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Kelompok 4 – 6 Tahun	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Tanpa pengelompokan usia	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Catatan:

- Usia Lahir-2 tahun: rasio guru dan peserta didik 1: ≤ 4
- Usia 2-4 tahun: rasio guru dan peserta didik 1: ≤ 8

- Usia 4-6 Tahun: rasio guru dan peserta didik 1: ≤15

6.3.3 Lama Belajar Perhari

Dokumen Lama Belajar Perhari sesuai kelompok usia yang dilayani:

- 0-2 Tahun : < 120 menit
- 0-2 Tahun : >= 120 menit
- 2-4 Tahun : < 150 menit
- 2-4 Tahun : >= 150 menit
- 4-6 Tahun : < 180 menit
- 4-6 Tahun : >= 180 menit

6.3.4 Lama belajar perminggu

Dokumen lama belajar perminggu sesuai kelompok usia yang dilayani:

- 0-2 Tahun : < 120 menit
- 0-2 Tahun : >= 120 menit
- 2-4 Tahun : < 360 menit
- 2-4 Tahun : >= 360 menit
- 4-6 Tahun : < 540 menit
- 4-6 Tahun : >= 540 menit
- 4-6 Tahun : < 900 menit
- 4-6 Tahun : >= 900 menit

6.3.5 Tingkat kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan

Dokumen daftar kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan:

- Daftar hadir pendidik
- Daftar hadir tenaga kependidikan
- Tidak memiliki dokumen

6.4 Pengawasan

6.4.1 Supervisi satuan

Dokumen supervisi dari Pemilik/Yayasan/Pemerintah kepada lembaga yang memuat unsur :

- Tujuan supervisi
- Temuan supervisi
- Umpan balik
- Tindak lanjut
- Tidak memiliki dokumen supervisi

STANDAR PEMBIAYAAN

7.1 Perencanaan pembiayaan

Dokumen Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Satuan (RAPBS), yang meliputi

- Biaya Investasi
- Biaya Operasional
- Biaya Personal
- Tidak memiliki RAPBS

7.2 Administrasi Keuangan

Dokumen pembukuan terkait pembiayaan yang dimiliki oleh satuan:

- Buku Kas
- Laporan keuangan
- Tidak memiliki dokumen pembukuan

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

8.1 Perencanaan

Dokumen penilaian perkembangan anak yang memuat:

- Tujuan
- Prinsip
- Prosedur
- Teknik Penilaian
- Waktu
- Pengolahan data
- Pelaporan
- Tidak memiliki dokumen

8.2 Pelaksanaan

Dokumen penilaian harian terhadap capaian perkembangan setiap anak, berupa:

- Ceklis
- Catatan anekdot
- Hasil Karya
- Tidak memiliki teknik penilaian

8.3 Pelaporan

Dokumen laporan hasil penilaian terhadap capaian perkembangan kepada orangtua peserta didik dengan frekuensi pelaporan:

- Setiap semester
- Setiap tahun
- Tidak membuat laporan



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)**

SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PAUD-RA/7471/0033/10/2018

DIBERIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

**RA. Aisyiyah Nurhaq
(NPSN 69888155)**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 24 A Kel. Baruga Desa/Kel.
Kec. Baruga Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara

Dengan peringkat:

**TERAKREDITASI B
(BAIK)**

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:

10 Oktober 2018 sampai dengan 10 Oktober 2023

Jakarta, 10 Oktober 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP. 196308211988121001
KETUA BAN PAUD DAN PNF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
NONFORMAL

Catatan:

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
2. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mendaftar di <http://www.banpaudpnf.ac.id>

Lampiran Sertifikat Akreditasi No. PAUD-RA/7471/0033/10/2018

PENJELASAN HASIL AKREDITASI

Penjelasan hasil akreditasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat akreditasi yang berisi tentang informasi tambahan yang berkaitan dengan hasil akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF. Hasil akreditasi yang diperoleh Satuan Pendidikan RA. Aisyiah Nurhaq pada program RA

No	Standar Nasional Pendidikan	Nilai Maksimum	Nilai Capaian	Persentase Capaian
1.	Kompetensi Lulusan/ Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	44	34	77%
2.	Isi	148	129	87%
3.	Proses	120	110	92%
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	56	48	86%
5.	Sarana dan Prasarana	100	90	90%
6.	Pengelolaan	220	164	75%
7.	Pembiayaan	52	40	77%
8.	Penilaian Pendidikan	44	32	73%
Total Nilai		784	647	

KETERANGAN PERINGKAT AKREDITASI

No.	Paket	Peringkat	Keterangan
1.	$655 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 784$	A	Unggul
2.	$524 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 654$	B	Baik
3.	$392 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 523$	C	Cukup
4.	$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 392$	Tidak Terakreditasi	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 395690 Kendari 93121
Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 28 Februari 2020

Nomor : 070/1249/Balitbang/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Kepala Ktr. Kementerian Agama Kendari
di -
KENDARI

Berdasarkan Surat Direktur PPs IAIN Kendari Nomor :
0382/In.23/P/PS.03.1/02/2020 tanggal, 27 Februari 2020 perihal tersebut di atas,
Mahasiswa di bawah ini :

Nama : WEHADI
NIM : 18040201022
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : RA. Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kanto:
Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**" KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN MUTU RA
(STUDI KASUS PADA RA. AISYIYAH NURHAQ BARUGA KENDARI) "**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 28 Februari 2020 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan
dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undang yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA


Dr. Ir. SUKANTO TODONG, MSP, MA
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19680720 199301 1 003

Terbusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Direktur PPs IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi. MPI PPs IAIN di Kendari;
4. Pimpinan RA. Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari di Tempat
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



YAYASAN PENDIDIKAN 'AISYIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KOTA KENDARI
RAUDHATUL ATHFAL 'AISYIYAH NURHAQ BARUGA
NPSN 101274710010 NSM 69888155 Akreditasi B
Jl. Sultan Qaimuddin No. 24 A Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari 93116

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR: No. 002/Kd.24.05/PP.004/3.21/RA./D/5/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsia, M.Pd
NIP. : -
Jabatan : Kepala RA
Unit Kerja : RA. Aisyiyah Nurhaq

Dengan ini menyetujui:

Nama : Wehadi
NIM : 18040201022
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Pekerjaan : Kepala Sekolah
Lokasi Penelitian : RA. Aisyiyah Nurhaq Baruga Kota Kendari

Telah melakukan penelitian dari tanggal 27 Februari – 04 Mei 2020 untuk dapat menyusun Tesis sebagai syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Kendari dengan judul:

“Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu RA (Studi Kasus pada RA Aisyiyah Nurhaq Baruga Kendari)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 29 Mei 2020



BIODATA PENELITI



Nama : Wehadi
NIM : 18040201022
Pekerjaan : Kepala RA Al-Aqsha Lepo-Lepo
Jeni Kelamin : Perempuan
Tempat & Tanggal Lahir : Wiwirano, 20 Mei 1965
Alamat : Jln. DI Panjaitan No. 15 Kelurahan Lepo-Lepo
Kecamatan Baruga Kota Kendari
No. Telepon/HP : 085241533149
E-Mail : -
Pengalaman Penelitian : Pernah Meneliti di RA Aisyiyah Nurhaq Baruga